



**B**etter  
anyumas



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan yang prima sehingga dapat melaksanakan tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa ke arah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan di segala bidang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penerapan SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan wujud implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selanjutnya penyusunan LKjIP sebagai salah satu komponen SAKIP, bertujuan untuk melaporkan capaian kinerja pejabat publik atas komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Akhirnya kami berharap melalui penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022, dapat menjadi media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintahan, agar ke depan dapat berkinerja lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Purwokerto, Februari 2023

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

## INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53114  
Telp. (0281) 630700 Faks. (0281) 643789 Email : inspektorat@banyumaskab.go.id

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwokerto, Februari 2023

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. NUGROHO PURWOADI, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630729 198810 1 00



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, serta membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten sekitar serta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya pada masing-masing tujuan, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan, dan strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten banyums dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 dapat dikatakan **Sangat Tinggi** (342,92%). Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Banyumas 2022. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan :

- a. 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (83,33%) tercapai dengan kategori "Sangat Tinggi";
- b. 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (16,67%) tercapai dengan kategori "Tinggi".

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama, 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama belum berhasil mencapai target yaitu :

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi masih menggunakan data tahun 2021 karena sampai laporan ini disusun, Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 belum di *publish* oleh Kementerian PAN dan RB;
- 2) Pertumbuhan Ekonomi/Persentase Pertumbuhan PDRB masih menggunakan data tahun 2021 karena sampai laporan ini disusun, data belum rilis dari BPS.
- 3) PDRB per Kapita masih menggunakan data tahun 2021 karena sampai laporan ini disusun, data belum rilis dari BPS;



- 4) Persentase Penduduk Miskin;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- 6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- 7) Persentase Kinerja Infrastruktur.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan 5 (lima) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%. Adapun untuk rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2022, sampai dengan saat ini masih terus ditindaklanjuti. Selain itu pada tahun 2023 juga telah direncanakan tindak lanjut perbaikan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh predikat “BB”, nilai 76,47. Adapun perkembangan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai tahun 2015-2021 adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	16,23	17,48	20,56	22,78	23,89	23,89	24,00
b.	Pengukuran Kinerja	9,61	10,63	12,72	18,66	19,38	19,99	20,23
c.	Pelaporan Kinerja	7,98	8,35	8,89	10,44	10,73	10,73	11,13
d.	Evaluasi Internal	4,00	5,25	6,14	6,40	7,13	7,14	7,75
e.	Capaian Kinerja	10,24	11,94	11,91	12,66	12,71	13,21	13,36
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>42,26</b>	<b>48,06</b>	<b>53,65</b>	<b>60,22</b>	<b>70,95</b>	<b>73,84</b>	<b>76,47</b>
	<b>Tingkat Kenaikan</b>		<b>5,80</b>	<b>5,59</b>	<b>6,57</b>	<b>10,73</b>	<b>2,89</b>	<b>2,63</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas bersama dengan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan **Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri**.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Pernyataan Reviu	ii	
Ikhtisar Eksekutif	iii	
Daftar Isi	v	
Daftar Tabel	vii	
Daftar Grafik	ix	
Daftar Gambar	x	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A.	Latar Belakang	1
B.	Gambaran Umum Kabupaten Banyumas	2
1.	Kondisi Geografis	2
2.	Luas Wilayah	2
3.	Topografi	3
4.	Kondisi Demografi	3
C.	Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	4
D.	Kewenangan Daerah	6
E.	Sumber Daya Aparatur	8
F.	Sumber Daya Keuangan	10
G.	Isu-isu Strategis	10
1.	Kualitas Sumber Daya Manusia	11
2.	Ketersediaan Infrastruktur	11
3.	Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	12
4.	Kemiskinan dan Pengangguran	13
5.	Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan	13
6.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	14
7.	Tata Kelola Pemerintahan	15
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>16</b>
A.	Rencana Strategis	16
1.	Visi	17
2.	Misi	18
3.	Tujuan dan Sasaran	19
B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
C.	Rencana Anggaran Tahun 2022	23
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>25</b>
A.	Analisis Capaian Kinerja Tujuan	28
1.	Tujuan 1 : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	28
2.	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	31
3.	Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan	37
4.	Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Non Pertanian	41
5.	Tujuan 5 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis	49
6.	Tujuan 6 : Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan	54



	untuk Perluasan Kesempatan Kerja	
7.	Tujuan 7 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	62
8.	Tujuan 8 : Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	73
9.	Tujuan 9 : Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat	79
B.	Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	83
1.	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja	85
2.	Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja	90
3.	Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa	92
BAB IV	PENUTUP	96
A.	Kesimpulan Umum Capaian Kinerja	96
B.	Progres penyelesaian isu-isu strategis	98
1.	Kualitas Sumber Daya Manusia	98
2.	Ketersediaan Infrastruktur	99
3.	Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	100
4.	Kemiskinan dan Pengangguran	101
5.	Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan	102
6.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	103
7.	Tata Kelola Pemerintahan	104
LAMPIRAN		



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	PNS berdasarkan Golongan	9
Tabel 1.2.	PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan	9
Tabel 1.3.	PNS berdasarkan Jabatan	9
Tabel 1.4.	Komposisi APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022	10
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022	21
Tabel 2.2.	Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022	23
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	26
Tabel 3.3.	Predikat Kinerja Tahun 2022	27
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tahun 2022	28
Tabel 3.5.	Rincian Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021	29
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022	32
Tabel 3.7.	Komponen IPM Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022	35
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan Tahun 2022	37
Tabel 3.9.	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2022	38
Tabel 3.10.	Capaian Kinerja capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022	41
Tabel 3.11.	Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021	43
Tabel 3.12.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021	45
Tabel 3.13.	Capaian Kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Tahun 2022	46
Tabel 3.14.	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis Tahun 2022	49
Tabel 3.15.	Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022	54
Tabel 3.16.	Jumlah Realisasi Investasi berdasarkan sektor Tahun 2022	56
Tabel 3.17.	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2022	63
Tabel 3.18.	Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2022	64
Tabel 3.19.	Panjang Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022	64
Tabel 3.20.	Kondisi infrastruktur irigasi Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022	66
Tabel 3.21.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019-2022	68
Tabel 3.22.	Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni dan Lingkungan Kumuh Perkotaan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022	68
Tabel 3.23.	Capaian Kinerja Tujuan Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022	73



Tabel 3.24.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022	74
Tabel 3.25.	Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022	77
Tabel 3.26.	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat Tahun 2022	80
Tabel 3.27.	Data Kejahatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2022	81
Tabel 3.28.	Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK RI)	83
Tabel 3.29.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas per tujuan/sasaran strategis Tahun 2022	84
Tabel 3.30.	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022	86
Tabel 3.31.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	88
Tabel 3.32.	Daftar Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022	93
Tabel 4.1.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	96



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022	27
Grafik 3.2.	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021	29
Grafik 3.3.	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	30
Grafik 3.4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022	32
Grafik 3.5.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Tahun 2022	33
Grafik 3.6.	Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022	37
Grafik 3.7.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	39
Grafik 3.8.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021	42
Grafik 3.9.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021	43
Grafik 3.10.	PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021 (juta rupiah)	46
Grafik 3.11.	PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (juta rupiah)	47
Grafik 3.12.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022	49
Grafik 3.13.	Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	50
Grafik 3.14.	Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022	55
Grafik 3.15.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022	57
Grafik 3.16.	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	57
Grafik 3.17.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022	58
Grafik 3.18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022	60
Grafik 3.19.	Persentase Kinerja Infrastruktur Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2022	63
Grafik 3.20.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022	74
Grafik 3.21.	Angka Kriminal Kabupaten Banyumas tahun 2019-2022 (per 10.000 Penduduk)	80
Grafik 4.1.	Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan ke-2	99
Grafik 4.2.	Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan ke-3	99
Grafik 4.3.	Persentase Kinerja Infrastruktur	100
Grafik 4.4.	Pengembangan Potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat	101
Grafik 4.5.	Kemiskinan dan Pengangguran	102
Grafik 4.6.	Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan	103



Grafik 4.7.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	104
Grafik 4.8.	Tata Kelola Pemerintahan	105



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Kabupaten Banyumas	2
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas	7
Gambar 3.1.	Penerimaan Penghargaan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Tahun 2021	31
Gambar 3.2.	Pelatihan UMKM	36
Gambar 3.3.	Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) tahun 2022	36
Gambar 3.4.	Peresmian Program Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Sehat Tidak Layak Huni (RTSTLH) oleh Bupati Banyumas	40
Gambar 3.5.	Pelatihan Keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK)	40
Gambar 3.6.	Peresmian Taman Maskemambang oleh Gubernur Jawa Tengah	47
Gambar 3.7.	Penandatanganan Bersama Peningkatan Jalan Baturraden-Serang-Belik oleh Bupati Banyumas, Bupati Banyumas dan Bupati Pemasang	47
Gambar 3.8.	Gerakan Tanam Jagung yang dipimpin oleh Wakil Bupati Banyumas	53
Gambar 3.9.	Pembukaan Gerakan Pangan Murah oleh Bupati Banyumas	53
Gambar 3.10.	Pelaksanaan Kegiatan Job Fair 2022	59
Gambar 3.11.	Sosialisasi Larangan Belanja Pakai Kantong Plastik	62
Gambar 3.12.	Pembangunan Jembatan Pegalongan-Mandirancan	66
Gambar 3.13.	Pembangunan Saluran Air di Legok, Kecamatan Pekuncan	67
Gambar 3.14.	Bupati Banyumas Meresmikan Program Pembangunan RTLH di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok	70
Gambar 3.15.	Kapal Angkutan Sungai Serayu Kabupaten Banyumas (Angsammas)	72
Gambar 3.16.	Bus Trans Banyumas	72
Gambar 3.17.	Peresmian Taman Botani oleh Bupati Banyumas	77
Gambar 3.18.	Banyumas Fashion Show	79
Gambar 3.19.	Forkompinda dan Forum Kerukunan Umat Beragama Mengikuti Gowes Bersama Kerukunan	83



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

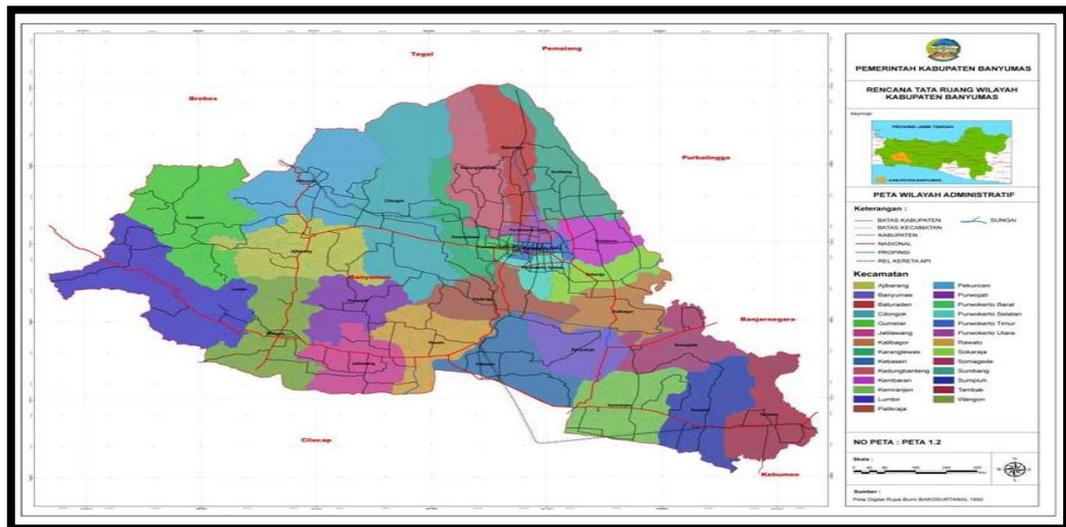
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022, merupakan laporan tertulis Pemerintah Kabupaten Banyumas atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama Tahun 2022. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berkelanjutan.

## B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Banyumas merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata  $\pm 108$  meter di atas permukaan laut, terletak antara  $7^{\circ} 15' 05'' - 7^{\circ} 37' 10''$  Lintang Selatan dan antara  $108^{\circ} 39' 17'' - 109^{\circ} 27' 15''$  Bujur Timur.

Gambar 1.1.  
Peta Kabupaten Banyumas



Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan. Secara administratif, Kabupaten Banyumas berbatasan dengan wilayah kabupaten yang lain yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

### 2. Luas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 Desa, dan 30 Kelurahan. Kabupaten Banyumas memiliki total luas wilayah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok yang meliputi 7,93% luas Kabupaten



Banyumas atau sekitar 10.534 Ha, dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 740 Ha.

Dari luas wilayah Kabupaten Banyumas tersebut terbagi menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Luas penggunaan lahan pertanian adalah 100.712 Ha dan luas penggunaan lahan pertanian bukan sawah sebesar 32.774 Ha.

### 3. Topografi

Wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada ketinggian 0-500 mdpl yaitu seluas 121.729,06 Ha. Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan bentuk bentang alam dan penyebaran geografisnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : 1) pegunungan di sebelah utara (lereng Gunung Slamet) dan daerah pegunungan Serayu Selatan; 2) dataran rendah di antara lereng Gunung Slamet dan pegunungan Serayu Selatan; dan 3) dataran rendah di sebelah selatan pegunungan Serayu Selatan.

Daerah dataran potensial sebagai kawasan budidaya, sedangkan daerah perbukitan dengan faktor pembatas kemiringan dan ketinggian lahan diarahkan untuk kawasan konservasi.

Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki topografi yang kompleks, kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan kondisi ketinggian lahan dan kemiringan lahan.

### 4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir Tahun 2022 sebesar 1.842.582 jiwa yang terdiri dari 928.845 laki-laki dan 913.737 perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Cilongok sebanyak 130.502 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 39.007 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.842.582 jiwa, maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 adalah 1.388 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 7.220,14 jiwa/km<sup>2</sup>, dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Lumbir



yaitu 514,89 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas masih terpusat di 4 kecamatan pada kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur. Pemusatan penduduk di kawasan perkotaan perlu didukung dengan penyediaan permukiman dengan infrastruktur yang memadai untuk mencegah timbulnya permukiman liar dan permukiman kumuh. Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk juga perlu dikendalikan karena keterbatasan daya dukung lingkungan kawasan perkotaan.

### C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Urusan pemerintahan konkruen dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:



- a) Pendidikan;
  - b) Kesehatan;
  - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - f) Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
- a) Tenaga Kerja;
  - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c) Pangan;
  - d) Pertanahan;
  - e) Lingkungan Hidup;
  - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - i) Perhubungan;
  - j) Komunikasi dan Informatika;
  - k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - l) Penanaman Modal;
  - m) Kepemudaan dan Olahraga;
  - n) Statistik;
  - o) Persandian;
  - p) Kebudayaan;
  - q) Perpustakaan;
  - r) Kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi :
- a) Kelautan dan Perikanan;
  - b) Pariwisata;
  - c) Pertanian;
  - d) Kehutanan;
  - e) Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - f) Perdagangan;
  - g) Perindustrian;
  - h) Transmigrasi.

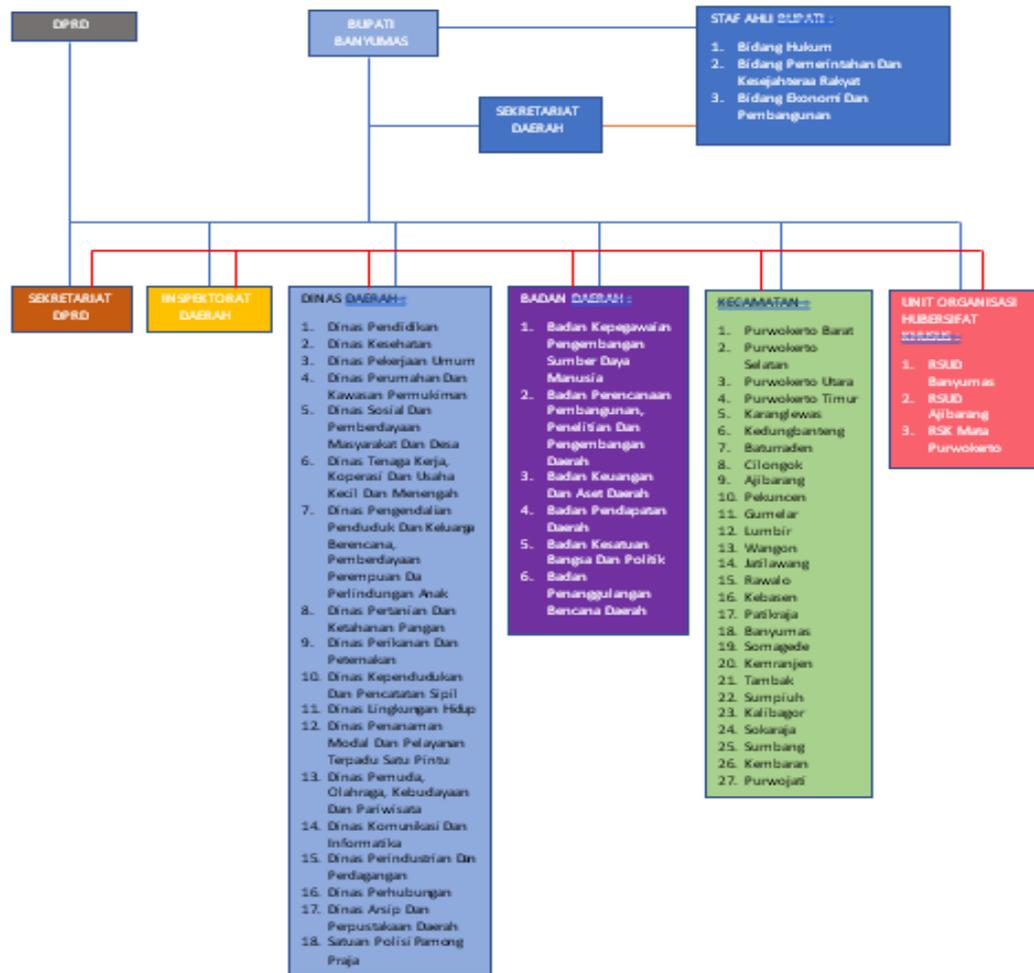


#### D. PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk kelembagaan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022 berjumlah 54 Perangkat Daerah dan 3 Unit Organisasi Bersifat Khusus, adapun struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas disajikan sebagai berikut :

Gambar 1.2.  
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas



Selain di bentuk Perangkat Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. UPTD pada Dinas Kesehatan :
  - a) Puskesmas sebanyak 40;
  - b) Balai sebanyak 2;
  - c) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
  - d) Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
  - e) Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto.
2. UPTD pada Dinas Pendidikan :
  - a) SMP Negeri sebanyak 71;
  - b) SD Negeri sebanyak 757;



- c) TK Negeri sebanyak 6;
- d) Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 3.
3. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup :
  - a) Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah sebanyak 6;
  - b) Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - c) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.
4. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Balai Latihan Kerja.
5. UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan :
  - a) Pusat Kesehatan Hewan;
  - b) Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
  - c) Pengembangan Budidaya Air Tawar ;
  - d) Rumah Potong Hewan.
6. UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan : Balai Benih Pertanian.
7. UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja : Unit Pemadam Kebakaran.
8. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Pasar Wilayah sebanyak 4
9. UPTD pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata :
  - a) Lokawisata Baturraden;
  - b) Lokawisata Purwomas;
  - c) Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria).
10. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
11. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum :
  - a) Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah sebanyak 7;
  - b) Laboratorium Konstruksi dan Peralatan.
12. UPTD pada Dinas Perhubungan :
  - a) Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan;
  - b) Pengujian Kendaraan Bermotor.

## E. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai



dengan kebutuhan. Kondisi sumber daya aparatur pada Pemerintah Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1.  
PNS berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
<b>Golongan I</b>	196	18	214	1,82
<b>Golongan II</b>	1.126	1.188	2.314	19,69
<b>Golongan III</b>	2.167	4.229	6.396	54,42
<b>Golongan IV</b>	1.282	1.546	2.828	24,06
<b>Jumlah</b>	<b>4.771</b>	<b>6.981</b>	<b>11.752</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2022

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.  
PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
<b>SD</b>	139	7	146	1,24
<b>SMP</b>	260	19	279	2,37
<b>SMA</b>	883	366	1.249	10,63
<b>D-I</b>	6	9	15	0,13
<b>D-II</b>	48	32	80	0,68
<b>D-III</b>	415	1.475	1.890	16,08
<b>S-1</b>	2.713	4.883	7.596	64,64
<b>S-2</b>	304	189	493	4,20
<b>S-3</b>	3	1	4	0,03
<b>Jumlah</b>	<b>4.771</b>	<b>6.981</b>	<b>11.752</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2022

3. Berdasarkan Jabatan

Jumlah PNS di Kabupaten Banyumas berdasarkan jabatannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3.  
PNS berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
<b>Pimpinan Tinggi</b>	24	3	27	0,23
<b>Administrator</b>	142	52	194	1,65
<b>Pengawas</b>	271	243	514	4,37
<b>Fungsional Tertentu</b>	2.500	4.728	7.228	61,50
<b>Pelaksana</b>	1.834	1.955	3.789	32,24
<b>Jumlah</b>	<b>4.771</b>	<b>6.981</b>	<b>11.752</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2022



Berdasarkan tabel-tabel di atas, maka komposisi pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bervariasi, yang menunjukkan adanya kesetaraan gender, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan bekerja yang sama.

## F. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2022 Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.  
Komposisi APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas  
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.567.598.307.620</b>	<b>3.489.753.749.708</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	854.988.929.320	844.424.372.260
1.2	Pendapatan Transfer	2.683.106.169.300	2.635.116.296.052
1.3	Lain-lain PAD yang sah	29.503.209.000	10.213.081.396
<b>2.</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.609.761.269.620</b>	<b>3.926.074.934.204</b>
2.1	Belanja Operasi	2.557.619.647.730	2.682.013.671.623
2.2	Belanja Modal	355.674.576.890	517.612.252.581
2.3	Belanja Tidak Terduga	49.000.000.000	48.682.000.000
2.4	Belanja Transfer	647.467.045.000	677.767.010.000
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>51.504.000.000</b>	<b>51.504.000.000</b>
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	93.666.962.000	487.825.184.496
3.1.1	Pengeluaran Pembiayaan	51.504.000.000	51.504.000.000
3.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0

Sumber : BKAD Kab. Banyumas, 2022

## G. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu



strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas saat ini sampai dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

## 1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebesar 72,44 menjadi 73,17 ditahun 2022.

Komponen pendidikan ditunjukkan dengan indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS ). Angka RLS Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebesar 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) dimana masih ditemukan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan kurangnya budaya baca masyarakat. Sementara angka HLS Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebesar 13,21 yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk pendidikan 2022 mengalami peluang untuk bersekolah selama 13,21 tahun.

Komponen kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) dimana AHH Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebesar 73,88. Sampai dengan tahun 2022, beberapa layanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas belum memenuhi kondisi yang ideal, diantaranya adalah jumlah/rasio dokter spesialis dan tenaga medis, rasio rumah sakit per satuan penduduk, serta rasio puskesmas per satuan penduduk, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi stunting yang masih tinggi.

Pengendalian pertumbuhan penduduk yang diukur dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana dengan jumlah penduduk yang tinggi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan perempuan yang diukur dengan Indek Pembangunan Gender (IPG), di bidang perlindungan anak dengan meningkatkan Nilai Kabupaten Layak Anak serta di bidang pemuda dengan meningkatkan kesempatan pemuda memiliki prestasi.

## 2. Ketersediaan Infrastruktur

Kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 sebesar kurang lebih 57,60%,



belum sepenuhnya memenuhi pelayanan infrastruktur salah satunya untuk aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dengan Kabupaten sekitar yang mendukung pariwisata. Untuk jaringan irigasi dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2022 pada jaringan irigasi primer mencapai 77,47% sedangkan jaringan irigasi sekunder sebesar 86,62%. Guna mencukupi kebutuhan air untuk areal pertanian seluas kurang lebih 100.712 Ha terdapat jaringan irigasi sepanjang kurang lebih 664.440 m.

Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan permukiman telah mendukung pengurangan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dari 6,12% pada tahun 2021, menjadi 5,75% pada tahun 2022, hal ini dikarenakan intervensi penanganan Kawasan kumuh pada tahun 2022 hanya berasal dari sumber dana APBD dan hanya menangani 6 Lokasi dengan luasan total 14,45 Ha . Pelayanan air bersih dan sanitasi yang merupakan kebutuhan dasar penduduk masih belum mencakup seluruh penduduk di Kabupaten Banyumas. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga pada tahun 2022 mencapai 76,99%, lebih 90 % pada tahun 2022. Pembangunan terminal sebagai bagian dari infrastruktur perhubungan masih terkendala. Dari 6 terminal yang direncanakan baru tersedia 4 terminal.

### **3. Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat**

PDRB perkapita Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 31,81 juta rupiah naik dari 30,21 juta rupiah di tahun 2020. Pemanfaatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional dalam pembangunan infrastruktur pariwisata menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Permasalahan pengembangan potensi daerah adalah belum teridentifikasinya seluruh potensi Kabupaten Banyumas yang ada agar dapat dikembangkan secara optimal, terarah, terencana dan berkelanjutan agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata merupakan



salah satu potensi daerah yaitu sebagai sektor yang mempunyai multiplier effect yang besar dalam mendorong pertumbuhan di sektor lainnya. Sehingga diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu pendapatan masyarakat.

#### 4. Kemiskinan dan Pengangguran

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 maka jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 mengalami penurunan 12.440 orang dari 232.910 orang menjadi 220.470 orang. Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebesar 12,84% turun 0,82 poin. Isu kemiskinan penduduk Kabupaten Banyumas terkait akses pelayanan dasar antara lain akses rumah layak, pangan, pendidikan dan kesehatan dan juga kesempatan berusaha dan bekerja, aspek keterampilan dan produktivitas kelompok serta belum terintegrasinya sasaran program dan kegiatan serta lokasi intervensi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024. Sesuai dengan kondisi kemiskinan ekstrem dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan yaitu 6,83% pada tahun 2020 atau 116.330 jiwa menjadi 1,39% pada tahun 2022 atau 23.910 jiwa. Mandat kebijakan ini harus dikawal dengan baik mengingat tantangan penanggulangan kemiskinan ekstrem sangat kompleks, karena merupakan akar dari kelompok masyarakat miskin dengan ciri utama kelompok masyarakat usia tidak produktif, tanpa keahlian dan pendidikan rendah. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebesar 6,05%, capaian ini sama dengan tahun 2021. Tantangan pengurangan pengangguran adalah bagaimana meningkatkan penanaman modal atau investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang didukung dengan kebijakan penanaman modal yang sehat, kompetitif dan saling menguntungkan.

#### 5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Pangan di Kabupaten Banyumas diukur menggunakan pendekatan Indeks Ketahanan Pangan, yang pada tahun 2022 sebesar



79,02%. Salah satu unsur Pilar Ketahanan Pangan adalah ketersediaan yang didalamnya terdapat produksi pangan domestik dalam hal ini produksi padi. Data menunjukkan bahwa produksi tanaman padi Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebesar 371.676,30 ton. Masih banyak kendala yang harus diatasi antara lain terjadinya konversi lahan pertanian, menurunnya kesuburan tanah, keterbatasan ketersediaan air dan infrastruktur irigasi, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan perubahan iklim.

## 6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu yang mendapat perhatian cukup serius dalam proses pembangunan, baik di tingkat regional maupun nasional, bahkan tingkat global, apalagi dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia yang disebabkan karena permasalahan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak dikelola dengan baik serta akibat dampak perubahan iklim.

Sampai dengan tahun 2022 persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau publik mencapai 2,64%. Namun demikian persentase luasan ruang terbuka hijau publik tersebut masih jauh dari kebutuhan luas ruang terbuka hijau publik perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah 72,83 sedangkan tahun 2022 adalah 63,81, dengan indeks untuk masing-masing komponen IKLH sebagai berikut: Indeks Kualitas Air (IKA) = 51,74, Indeks Kualitas Udara (IKU) = 86,04, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) = 43,44. Nilai IKLH tersebut menggambarkan kualitas lingkungan Kabupaten Banyumas tahun 2022 masuk kategori sedang. Permasalahan lingkungan lain yang masih perlu perhatian adalah pengelolaan sampah. Pelayanan penanganan sampah masih terpusat pada kawasan perkotaan. Berbagai inovasi pengelolaan sampah juga belum memberikan manfaat yang optimal. Hal ini antara lain ditunjukkan belum semua rumah tangga melakukan pemilahan sampah, residu sampah yang masih relatif besar, dan masih ditemukan pembuangan sampah liar di beberapa lokasi.



## 7. Tata Kelola Pemerintahan

Nilai SAKIP Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 adalah 76,47 atau dengan predikat BB sementara Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 adalah 71,12 atau dengan predikat BB. Pencapaian tersebut menjadikan Pemerintah Kabupaten Banyumas menduduki peringkat pertama di Jawa Tengah. Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai piloting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan salah satu strategi yang lahir dengan semangat untuk mempercepat dampak dan hasil capaian reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan kebutuhan atau keharusan, karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional. Perubahan diantaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi, agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah Peningkatan profesionalisme aparatur, pengembangan kompetensi SDM aparatur, keterbukaan dan transparansi informasi, pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah berbasis inovasi dan IT serta komitmen bersama mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling rendah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah perlu ditingkatkan juga dalam peningkatan penanganan bencana dimana Kabupaten Banyumas adalah termasuk daerah rawan bencana. Selain itu juga diperlukan kapasitas fiskal yang besar terutama untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

**P**erencanaan Strategis sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, telah ditetapkan 9 (sembila) tujuan dan 22 (dua puluh dua) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

## 1. VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah : ***“MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL-MAKMUR DAN MANDIRI”***.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Maju** : Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.
- Adil-  
Makmur** : Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh



kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

**Mandiri** : Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

## 2. MISI

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam 8 (delapan) Misi yang pelaksanaannya dituangkan dalam program Hasta Krida, yaitu :

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.



- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

### 3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, sedangkan Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam Rencana Strategis/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam rangka untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. **Tujuan 1** : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasarannya sebagai berikut :
  - 1) Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
  - 2) Meningkatnya birokrasi yang kapabel.
  - 3) Meningkatnya pelayanan publik yang prima.
- b. **Tujuan 2** : Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasarannya sebagai berikut:
  - 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
  - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
  - 3) Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.
  - 4) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
- c. **Tujuan 3** : Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan, dengan sasarannya yaitu : Meningkatnya perlindungan,



- memenuhi kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin.
- d. **Tujuan 4** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian, dengan sasarannya sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan.
  - 2) Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani.
- e. **Tujuan 5** : Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis, dengan sasarannya yaitu : meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agribisnis untuk ketersediaan pangan utama.
- f. **Tujuan 6** : Perwujudan pembangunan kawasan peruntukan industri dan Kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja, dengan sasarannya sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya investasi daerah.
  - 2) Meningkatnya kesempatan berusaha.
  - 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup.
  - 4) Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan Kawasan strategis yang berwawasan lingkungan.
  - 5) Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
- g. **Tujuan 7** : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, dengan sasarannya yaitu : meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai.
- h. **Tujuan 8** : Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan sasarannya sebagai berikut:



- 1) Meningkatnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal.
  - 2) Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- i. **Tujuan 9** : Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, dengan sasarannya sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.
  - 2) Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah.
  - 3) Meningkatnya peran dan daya saing pemuda.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Banyumas Tahun 2022, disusun mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2022 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dan Perubahannya Tahun 2022, telah



disusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,38
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	Persentase penduduk miskin	%	11,76
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	1. Pertumbuhan Ekonomi/Persentase pertumbuhan PDRB	%	4,5
		2. PDRB per kapita	Juta Rp.	33,725
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,03
6.	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan Kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	1. Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah	%	2
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,00
		3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,06
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Persentase Kinerja Infrastruktur	%	69,33
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	5,00
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,586

Sumber data: Perubahan RPJMD Kab. Banyumas 2018-2023



### C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 dianggarkan melalui :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) Tahun 2022, yang ditetapkan dengan :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
  - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) tahun 2022 ditetapkan :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 .
  - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

Alokasi anggaran berdasarkan tujuan untuk masing-masing kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.  
Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No.	TUJUAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.174.667.101.154
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	2.031.972.822.014
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	20.860.847.381
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	71.146.471.345
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	30.035.741.106
6.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	69.735.204.897
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	424.929.078.993



No.	TUJUAN	ANGGARAN (Rp.)
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	14.767.818.500
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	60.687.068.266
<b>JUMLAH</b>		<b>3.898.802.153.656</b>

Sumber Data : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2022

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

**S**istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, AKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam skala nilai dan predikat kinerja sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Skala Nilai	Predikat Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Hasil pengukuran atas indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
<b>TUJUAN 1</b>						
<b>Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>						
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73	71,12*	97,42	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 2</b>						
<b>Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat</b>						
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,38	73,17	101,09	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 3</b>						
<b>Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan</b>						
3.	Persentase penduduk miskin	%	11,76	12,84	91	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 4</b>						
<b>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian</b>						
4.	Pertumbuhan Ekonomi/Persentase Pertumbuhan PDRB	%	4,5	4*	88,89	Tinggi
5.	PDRB per Kapita	Juta rupiah	33,725	31,81*	94,32	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 5</b>						
<b>Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis</b>						
6.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,03	79,02	106,74	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 6</b>						
<b>Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja</b>						
7.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	2	60,32	3.016	Sangat Tinggi
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,00	6,05	79	Tinggi
9.	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,06	63,81	99,61	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 7</b>						
<b>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat</b>						
10.	Persentase Kinerja Infrastruktur	%	69,33	64,33	92,79	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 8</b>						
<b>Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif</b>						
11.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	5	6,38	127,6	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 9</b>						
<b>Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat</b>						

Tujuan/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
12. Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,586	1,26	120,55	Sangat Tinggi
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>				<b>342,92</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Catatan : Data yang bertanda \* adalah data tahun 2021

Sumber : E-Monev Kabupaten Banyumas, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah sebesar **342,92%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.

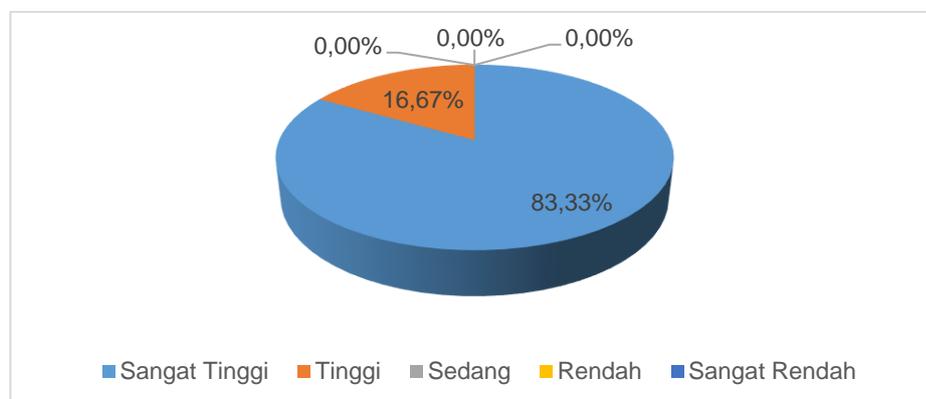
Predikat Kinerja Tahun 2022

No.	Kriteria Penilaian Predikat Kinerja	IK	%
1	Sangat tinggi	10	83,33
2	Tinggi	2	16,67
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat rendah	-	-
<b>Jumlah IKU</b>		<b>12</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 3.1.

Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022



Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2022

## A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN

### 1. TUJUAN 1 : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

*Good governance* diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi. Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas nomor 70 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 dan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dimana Misi pertama yaitu “*Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik*”.

Pada tahun 2022 telah dilakukan evaluasi atas implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh tim dari Kemenpan dan RB, namun sampai dengan selesai disusunnya laporan kinerja ini belum ada hasil evaluasi yang diperoleh. Sehingga capaian indeks reformasi yang disajikan pada laporan ini merupakan hasil evaluasi tahun 2021. Secara lebih rinci realisasi capaian indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

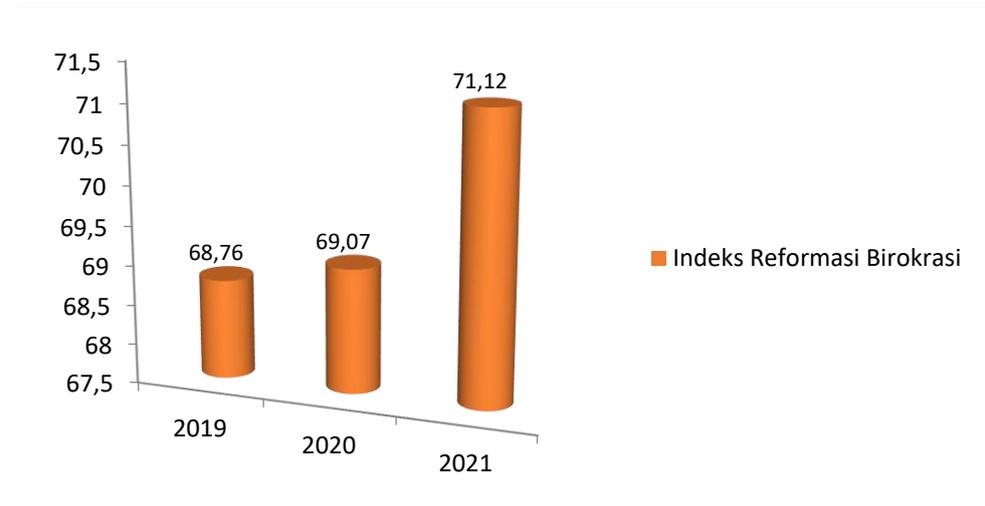
Tabel. 3.4.

Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2022
		Target	Realisasi	%		
<b>Indek Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	73	71,12*	97,42	75	94,83

Adapun realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2021 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.2.  
Indeks Reformasi Birokrasi  
Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2022

Capaian kinerja tujuan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 adalah sebesar 71,12. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

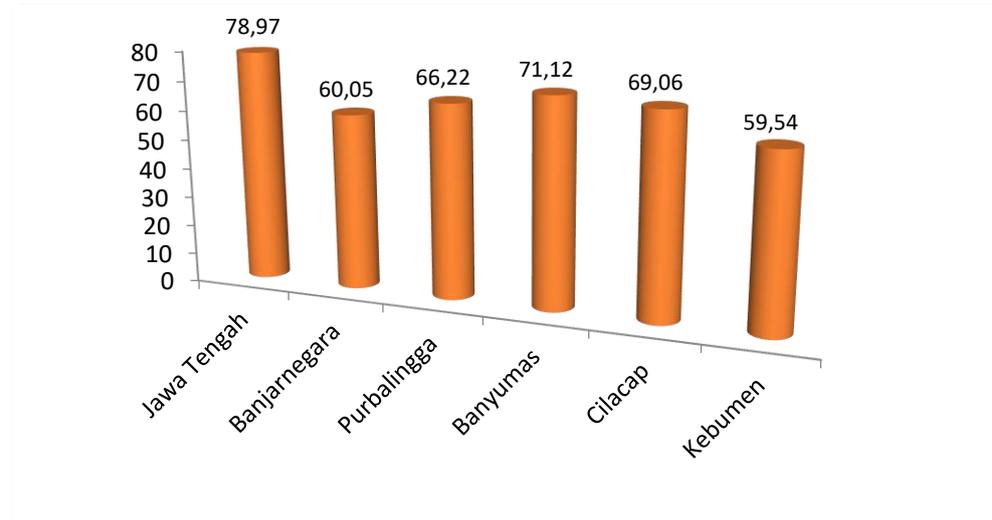
Tabel. 3.5.  
Rincian Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
	I. Pemenuhan	20,00	11,75
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,33
	III. Reform	30,00	18,92
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>37,00</b>
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,25
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,09
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,40
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,38
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40,00</b>	<b>34,12</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100,00</b>	<b>71,12</b>

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Grafik 3.3

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2022

Pemerintah Kabupaten banyumas telah berkomitmen untuk melaksanakan implementasi reformasi birokrasi sampai dengan perangkat daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 68,76, di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 69,07 dan naik kembali di tahun 2021 sebesar 71,12 dengan kategori “BB”.

Upaya peningkatan ini tidak lepas dari beberapa faktor pendorong, diantaranya adalah :

- a) Adanya komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten Banyumas;
- b) Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya peningkatan pelayanan publik sehingga menghasilkan

- elayanan yang transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya dimasa pandemi COVID-19;
- c) Semakin meningkatnya pemahaman ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pencanangan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
  - d) Koordinasi dan kerja sama antara Perangkat Daerah terkait pengampu kebijakan Reformasi Birokrasi dengan pelaksana.

Gambar 3.1.

Penerimaan Penghargaan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Tahun 2021



Sumber : Humas Kabupaten Banyumas, 2022

Tercapainya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh 34 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 1.174.667.101.154,- dan realisasi sebesar Rp. 1.103.819.309.764,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 93,97%. Dari 34 program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 30 program.

## **2. TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Bahwa untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara lebih rinci realisasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.6.

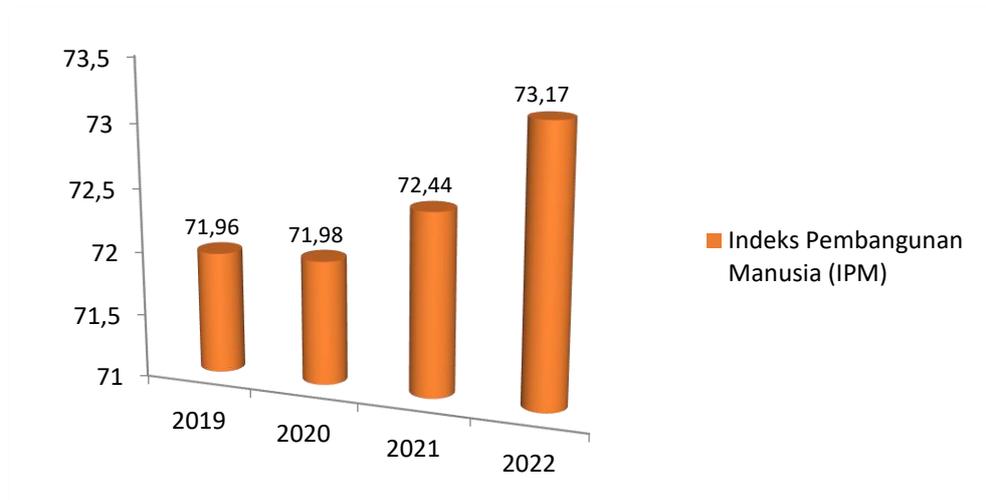
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2022
		Target	Realisasi	%		
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,38	73,17	101,09	72,58	100,81

Adapun realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2022 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.4.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022



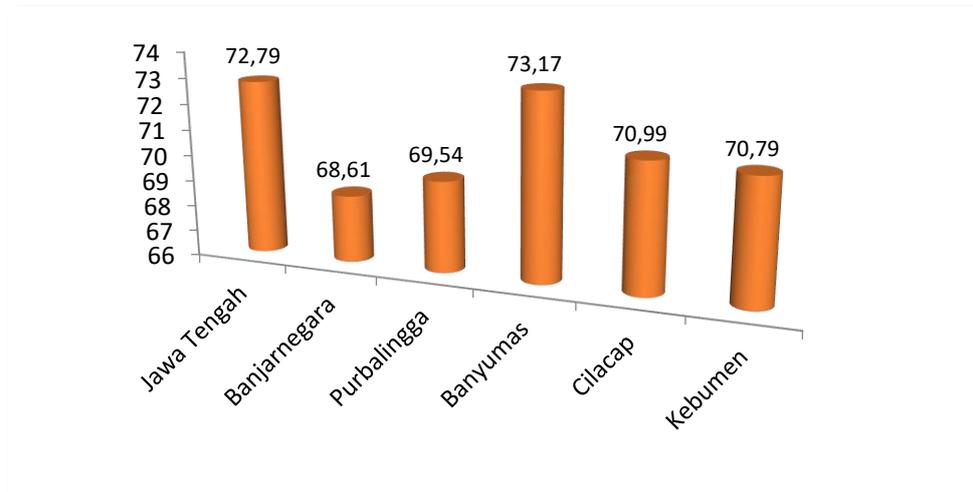
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah,2022

Jika dibandingkan kabupaten di sekitar Kabupaten Banyumas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Banyumas mempunyai IPM paling tinggi. IPM Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebesar 73,17 berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah. Sehingga tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam kategori “tinggi”, sesuai klasifikasi

UNDP, dimana tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah ( $0 \leq \text{IPM} < 60$ ), kategori sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ), kategori tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ) dan kategori sangat tinggi ( $80 \leq \text{IPM} \leq 100$ ).

Grafik 3.5.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan rumusan UNDP komponen IPM meliputi tiga komponen yaitu komponen angka harapan hidup, komponen pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta komponen pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Adapun Komponen Indeks Pembangunan Manusia yaitu :

a) **Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya



pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

b) **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Selain Angka Harapan Lama Sekolah, indikator pendidikan yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*). Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang digunakan UNDP dalam menghitung MYS dibatasi pada penduduk berusia 25 tahun ke atas. Batasan itu dimaksudkan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga kurang tepat apabila dihitung MYS-nya.

c) **Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup pada waktu lahir (*Expectation of Life/Eo*) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka ini biasanya dihitung dengan bantuan tabel kematian (*life table*). Namun demikian penerapan indikator tersebut di negara berkembang dihadapkan pada masalah kelangkaan data untuk penghitungan secara langsung (*direct estimate*), sehingga kedua angka tersebut di Indonesia diperkirakan secara tidak langsung (*indirect estimate*) melalui data hasil sensus atau survei penduduk.

d) **Pengeluaran Perkapita Disesuaikan**

Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan makin meningkat pula. Tetapi hubungan ini tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah dari tingkat kenaikan harga secara umum.

Adapun capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.7.

Komponen IPM Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022

Komponen IPM	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah	12,82	12,85	13,03	13,21
Rata-rata Lama Sekolah	7,42	7,52	7,62	7,78
Usia harapan hidup	73,55	73,72	73,8	75,71
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	11,703	11.448	11.546	11.905
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>71,96</b>	<b>71,98</b>	<b>72,44</b>	<b>73,17</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Keberhasilan peningkatan nilai Indek Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan melalui upaya :

- 1) Pembangunan fasilitas kesehatan yang mempermudah masyarakat untuk berobat.
- 2) Pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin pada Puskesmas dan RSUD.
- 3) Pemenuhan tenaga kesehatan pada Puskesmas dan RSUD.
- 4) Penguatan Deteksi Dini masyarakat melalui Denmas Slamet (Deteksi dini ben masyarat dan ibu hamil slamet) dan penguatan Deteksi dini nakes melalui pelatihan Gadarmatneo (Gawat Darurat maternal Neonatal).
- 5) Membangkitkan kembali kelas BAPAKE MAMAKE (pendampingan ibu hamil oleh keluarga pada form edukasi dan pelayanan bagi ibu hamil oleh nakes).
- 6) Penguatan jejaring rujukan Matneo melalui review PKS Rujukan Matneo.
- 7) Sosialisasi Pedoman Eradikasi PE (Penyelidikan Epidemiologi).
- 8) Menyediakan bus sekolah gratis bagi pelajar sehingga mempermudah pelajar untuk menuju ke sekolahnya.
- 9) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan .
- 10) Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik.
- 11) Penyediaan anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas.
- 12) Pemberian bantuan dana bergulir bagi UMKM.
- 13) Pelatihan bagi UMKM untuk menin gkatkan kualitas SDM maupun produknya.

Gambar 3.2.  
Pelatihan UMKM



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2022

Gambar 3.3.  
Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) tahun 2022



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2022

Tercapainya tujuan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat didukung oleh 18 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 2.031.972.822.014,- dan realisasi sebesar Rp. 1.760.279.474.891,- sehingga rata-rata capaian

realisasi anggaran sebesar 86,63%. Dari 18 program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 10 program.

### 3. TUJUAN 3 : Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan

Dalam perubahan RPJMD 2018-2023 di tahun 2021, maka dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pembangunan yang berkeadilan Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator utama, yaitu Persentase Penduduk Miskin.

Secara lebih rinci realisasi capaian Persentase Penduduk Miskin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8.

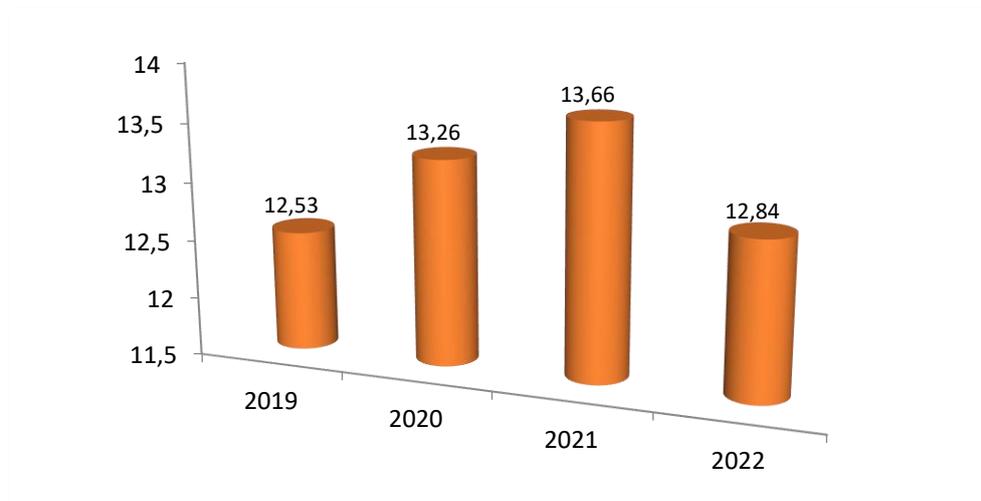
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2022
		Target	Realisasi	%		
Persentase Penduduk Miskin	%	11,76	12,84	90,82	11,00	83,27

Adapun realisasi indikator kinerja Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2022 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.6.

Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022



Dengan kejadian luar biasa pandemi COVID-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah mengubah target indikator persentase penduduk miskin Tahun 2021 s.d. tahun 2023. Dengan adanya pandemi COVID-19 bukan hanya memunculkan masalah kesehatan, namun juga berdampak pada aspek sosial-ekonomi yang pada gilirannya berpengaruh pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya kemiskinan. Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas juga tinggi.

Adapun jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.9.

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin  
Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2022

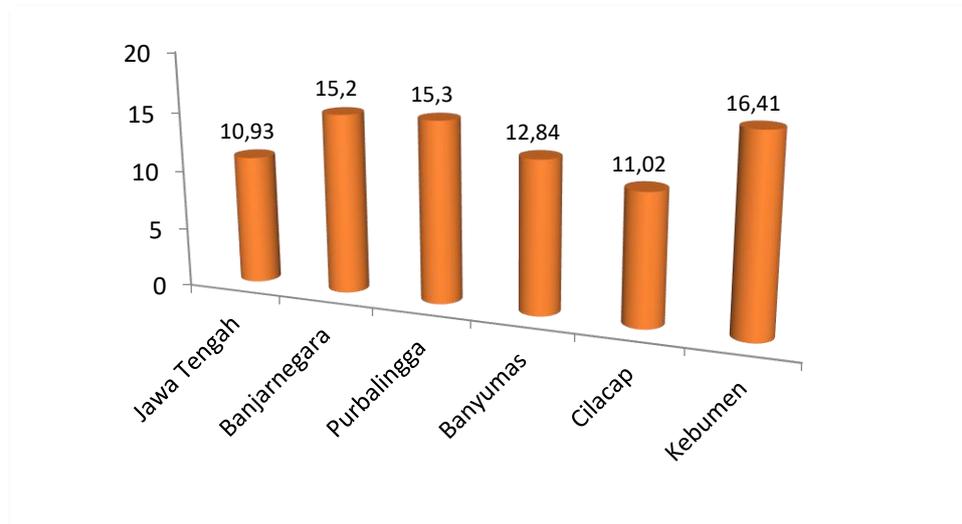
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2019	211,65	12,53
2020	225,84	13,26
2021	232,91	13,66
2022	220,47	12,84

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb (BARLINGMASCAKEB : Kab. Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) prosentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menempati peringkat ke-2. Adapun grafik Persentase Penduduk Miskin adalah sebagai berikut :

Grafik 3.7.

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas,  
Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pemerintah Kabupaten Banyumas berusaha menangani dampak pandemi COVID-19 melalui upaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi untuk pemulihan kondisi kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem dilakukan melalui konvergensi pemanfaatan anggaran dan konsolidasi program/kegiatan, baik yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan pendapatan, yang menyoar kelompok miskin ekstrem yang tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Untuk merencanakan kebijakan dan strategi terkait percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, langkah awal yang harus dilakukan adalah identifikasi (mapping) program/kegiatan dan anggaran terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, baik yang berasal dari sumber pembiayaan APBN maupun APBD.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah kabupaten Banyumas dalam penanggulangan kemiskinan di tahun 2022 antara lain :

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan kegiatan Rehab Rumah Tidak Sehat Tidak Layak Huni (RTSLH);
- 2) Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi;
- 3) Integrasi Peserta Kartu Banyumas Sehat dengan BPJS;
- 4) Penanganan Stunting;

- 5) Bea siswa miskin bagi siswa SD dan SMP;
- 6) Bansos terkaitan orang-orang yang mempunyai kerentanan sosial;
- 7) Pelatihan keterampilan di BLK Kabupaten Banyumas;
- 8) Pembinaan kelompok tani.

Gambar 3.4.

Peresmian Program Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Sehat Tidak Layak Huni (RTSTLH) oleh Bupati Banyumas



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2022

Gambar 3.5.

Pelatihan Keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK)



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2022

Tercapainya tujuan meningkatkan pembangunan yang berkeadilan didukung oleh 10 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 20.860.847.381,- dan realisasi sebesar Rp. 17.432.425.853,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 83,57%. Dari 10 program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 9 program

#### 4. TUJUAN 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita.

##### a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diyakini bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Pemanfaatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional dalam pembangunan infrastruktur pariwisata menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Angka Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2022 belum tersedia, dikarenakan belum adanya rilis dari BPS, akan tetapi tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas diproyeksikan tumbuh mencapai 4,50 persen.

Secara lebih rinci realisasi capaian Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.10.

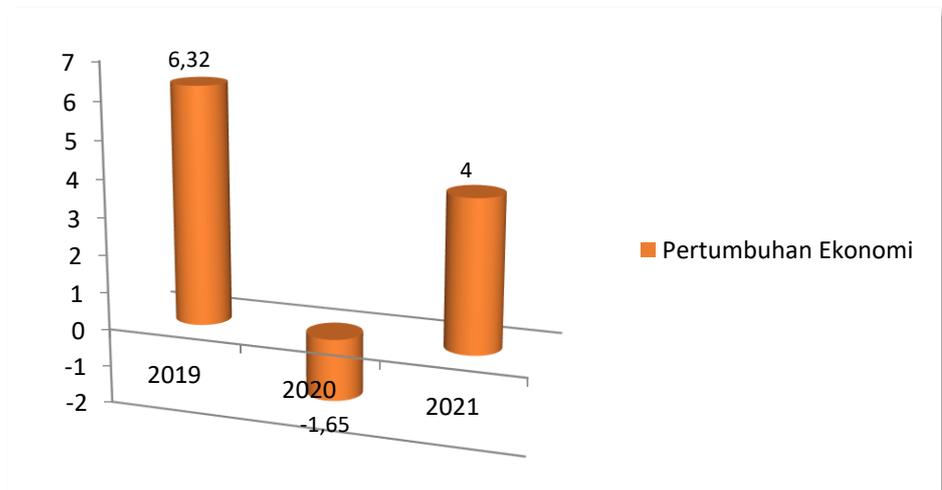
Capaian Kinerja capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2022
		Target	Realisasi	%		
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,5	4*	88,89	5	80

Catatan : Data yang bertanda \* adalah data tahun 2021

Peningkatan indikator kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2021 apabila dibandingkan dengan pencapaian selama kurun waktu tahun 2019-2021 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.8.  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas  
Tahun 2019-2021



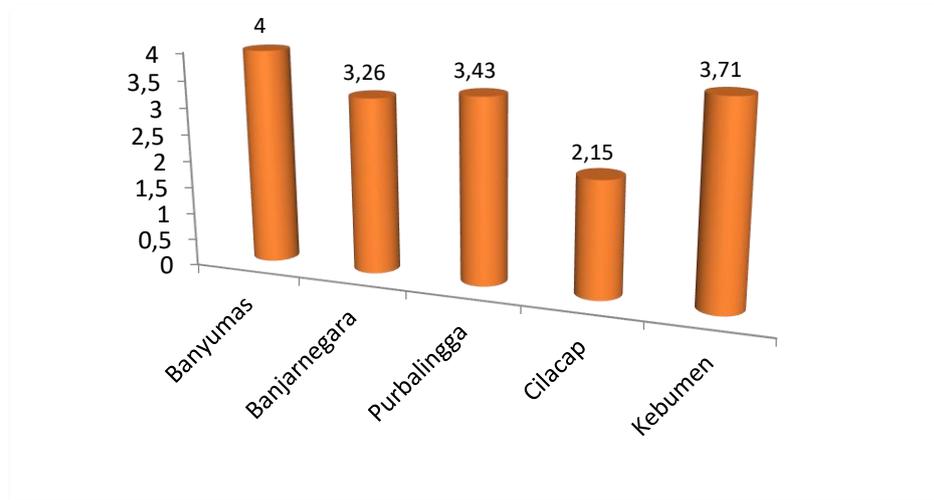
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas sebelum adanya COVID-19, yaitu tahun 2017-2019 tampak relatif tinggi dan cukup stabil . Pada tahun 2021, kendati masih terimbas dampak Pandemi Covid-19, ternyata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas mulai bergairah. Hal ini ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi naik menjadi 4,00 persen, dibanding tahun 2020 masih di angka minus 1,65 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dengan kabupaten di sekitar yang disajikan dalam grafik berikut :

Grafik 3.9.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021



Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020 yang paling besar adalah sektor konstruksi mencapai 7,62 persen. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (6,06 persen), kemudian pengadaan listrik dan gas (5,74 persen). Ini menandakan sektor industri juga mulai bergerak. Selanjutnya pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang (5,66 persen).

Adapun rincian persentase kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyumas, tahun 2017 s.d 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.11.

Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021

	Sektor PDRB	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,31	1,51	0,94
B	Pertambangan dan Penggalian	3,34	-2,21	4,45
C	Industri Pengolahan	7,99	-0,05	3,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,16	2,55	5,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,17	4,15	5,66
F	Konstruksi	4,30	-3,71	7,62



	Sektor PDRB	2019	2020	2021
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,11	-3,70	6,06
H	Transportasi dan Pergudangan	7,97	-31,84	2,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,76	-7,08	5,61
J	Informasi dan Komunikasi	11,74	13,81	4,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,29	1,59	1,22
L	Real Estate	5,48	-0,37	2,66
M,N	Jasa Perusahaan	10,08	-5,26	2,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,64	-1,34	0,07
P	Jasa Pendidikan	8,10	-0,26	0,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,28	7,83	1,94
R,S, T,U	Jasa lainnya	9,05	-5,44	0,62

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

#### b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Banyumas berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, mencapai 40.686,81 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat 4% dari jumlah tahun 2020. Disisi lain, sektor yang memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2021 atas dasar harga berlaku adalah sektor industri pengolahan sebesar 25,56%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,50%, sektor konstruksi sebesar 13,49% serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,08%. Sedangkan sektor lain memberikan kontribusi disekitaran 3-5%, bahkan ada tiga sektor yang rendah kontribusinya yaitu sektor pengadaan Listrik & Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta sektor Jasa Perusahaan.

Adapun rincian persentase laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyumas menurut harga konstan tahun 2019 s.d 2021 sebagai berikut :

Tabel. 3.12.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021

	Sektor PDRB	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,99	12,45	12,08
B	Pertambangan dan Penggalian	5,53	5,57	5,55
C	Industri Pengolahan	24,66	25,37	25,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,08	0,08
F	Konstruksi	13,20	12,82	13,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,57	15,23	15,50
H	Transportasi dan Pergudangan	3,56	2,50	2,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,33	3,11	3,15
J	Informasi dan Komunikasi	4,89	5,60	5,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,15	3,23	3,21
L	Real Estate	2,18	2,20	2,15
M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	3,00	2,80
P	Jasa Pendidikan	5,64	5,57	5,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	1,11	1,07
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,82	1,75	1,67

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Selama tiga tahun terakhir lapangan usaha-lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Banyumas adalah lapangan usaha industri pengolahan, kemudian diikuti oleh lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha konstruksi.

Secara lebih rinci realisasi capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.13.

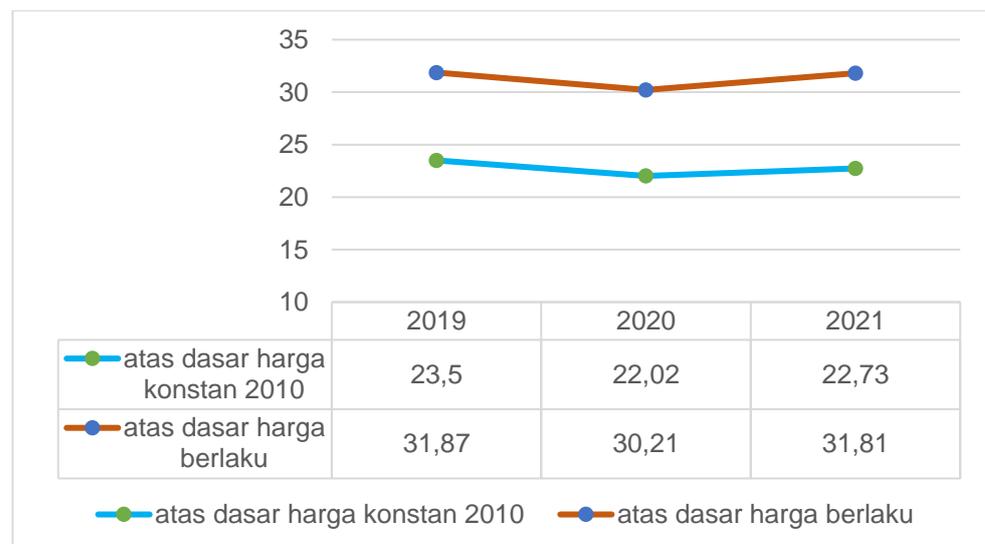
Capaian Kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita  
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2022
		Target	Realisasi	%		
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	rupiah	33,725	31,81*	94,32	35,513	89,57

Catatan : Data yang bertanda \* adalah data tahun 2021

Grafik 3.10.

PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021 (juta rupiah)

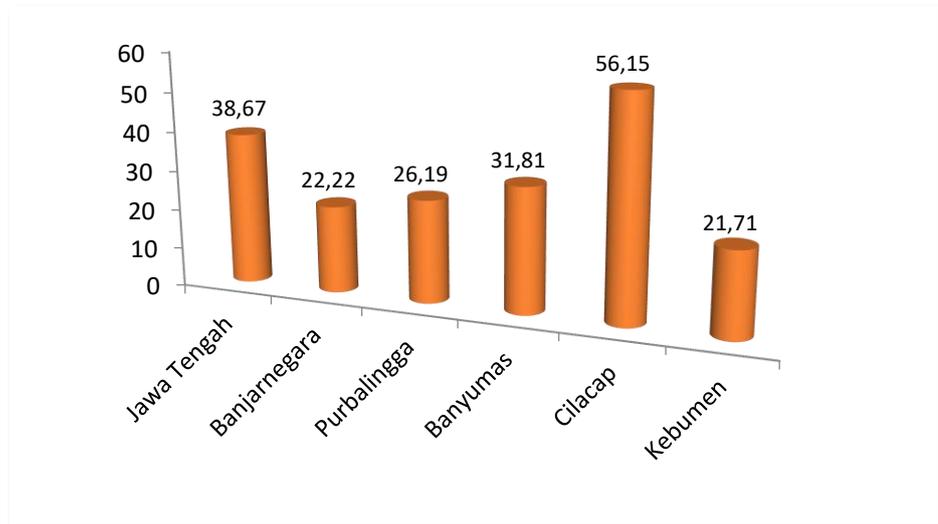


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Seperti terlihat pada grafik dibawah ini, perbandingan PDRB Perkapita Banyumas tahun 2021 dengan kabupaten sekitar.

Grafik 3.11.

PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (juta rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kenaikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB per kapita di Kabupaten Banyumas di antaranya dipicu dengan banyaknya kegiatan pembangunan infrastruktur terkait proyek konstruksi, terutama berkait dengan pengembangan sektor pariwisata dari program dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu potensi daerah yaitu sebagai sektor yang mempunyai multiplier effect yang besar dalam mendorong pertumbuhan di sektor lainnya. Sehingga diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu pendapatan masyarakat. Selain dari program PEN, dalam rangka peningkatan sektor wisata dan mendorong tingkat perekonomian maka Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama dengan Purbalingga dan Pemalang, secara bersama-sama menggagas pembangunan jalan antara Baturraden di Banyumas, Serang di Purbalingga sampai Belik, Pemalang.

Gambar 3.6.

Peresmian Taman Maskemambang oleh Gubernur Jawa Tengah



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2022

Gambar 3.7.

Penandatanganan Bersama Peningkatan Jalan Baturraden-Serang-Belik  
oleh Bupati Banyumas, Bupati Banyumas dan Bupati Pemalang



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2022

Selain langkah tersebut diatas, tercapainya tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian didukung oleh 20 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 71.146.471.345,- dan realisasi sebesar Rp. 64.522.915.684,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar

90,69%. Dari 20 program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 17 program.

### 5. TUJUAN 5 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis telah ditetapkan indikator berupa Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Secara lebih rinci realisasi capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.14.

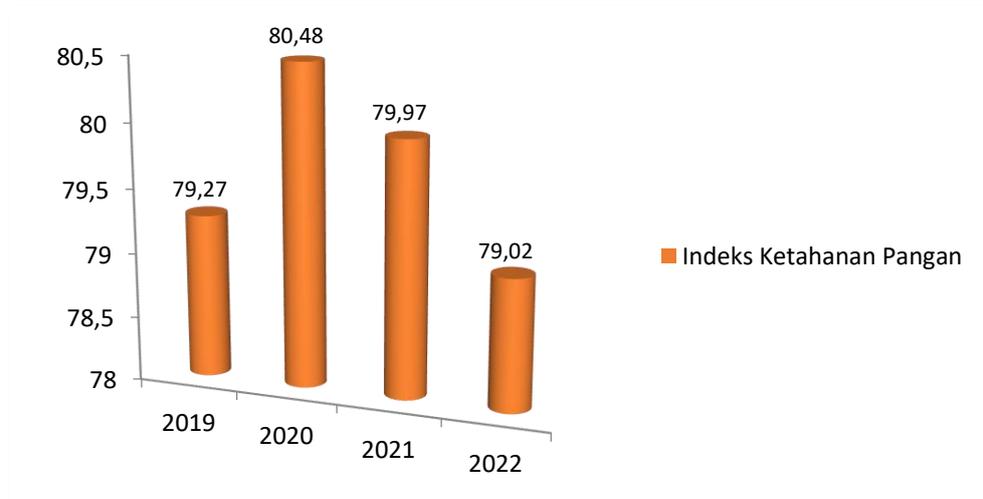
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2022
		Target	Realisasi	%		
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,03	79,02	106,74	74,04	106,73

Adapun realisasi indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2022 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.12.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022

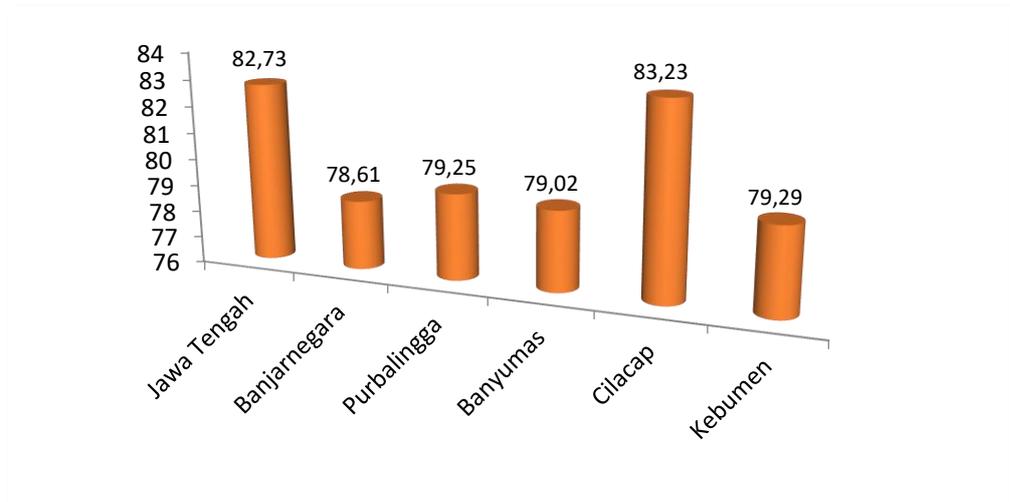


Sumber : Indeks Ketahanan Pangan, 2019-2022

Untuk capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) kabupaten di sekitar Kabupaten Banyumas (BARLINGMASCAKEB : Kab. Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen), nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas Nomor 4 setelah Kabupaten Purbalingga. Adapun grafik Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sebagai berikut :

Grafik 3.13.

Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



Sumber : Badan Pangan Nasional (Bapanas),2022

Penurunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi padi yang disebabkan oleh Dampak Perubahan Iklim (DPI) dimana curah hujan tinggi sepanjang tahun 2022. Hal ini mengakibatkan banjir di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas sehingga menyebabkan kondisi gagal panen pada areal tanaman padi seluas 999 hektar. Kondisi juga berpengaruh terhadap produksi kedelai sehingga mengalami penurunan produksi yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Penurunan produksi padi juga disebabkan karena serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) seperti tikus, WBC, kresek dan tenggerak batang, burung.

Selain karena faktor alam dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan sehingga mempengaruhi pola dan kualitas konsumsi masyarakat. Hal ini juga memiliki andil dalam penurunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas.



Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a) Aspek Ketersediaan :

- 1) Optimalisasi produksi tanaman pangan utama yang meliputi Padi, Jagung, Kedelai, serta mengembangkan diversifikasi pangan lain melalui optimalisasi tanaman pangan lain seperti Ubi Kayu dan Ubi Jalar;
- 2) Pembangunan LPMDes (Lumbung Pangan Masyarakat Desa) di 4 lokasi yaitu :
  - Gapoktan Sri Lestari Desa Karanglo Kec. Cilongok;
  - Gapoktan Margo Kencono Desa Margasana Kec. Jatilawang;
  - Gapoktan Mugi Rahayu Desa Petarangan Kec. Kemranjen dan
  - Gapoktan Ngudi Tani Desa Karangpetir Kec. Tambak
- 3) Penguatan cadangan pangan berupa pengisian Lumbung dengan Gabah Kering Giling pada 4 LPMDes.

b) Aspek Keterjangkauan :

- 1) Pemberian bantuan pada daerah rawan pangan;
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, melalui :
  - Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (OPP) bekerjasama dengan PKK Kabupaten Banyumas;
  - Demplot Pertanaman dan Panen dan Pasca Panen;
  - Pelatihan Hidroponik;
  - Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan
- 3) Gerakan Pangan Murah

c) Aspek Pemanfaatan Pangan :

- 1) Pengawasan keamanan pangan untuk menjamin pangan yang aman bagi masyarakat;
- 2) Fasilitasi Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk produk-produk pangan, dan
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Olahan Pangan Lokal untuk mewujudkan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat serta mengatasi masalah stunting.



Pada tahun 2022 Kabupaten Banyumas mengalami inflasi, dengan sumbangan terbesar inflasi dari komoditas pangan (beras dan telur) serta transportasi. Sehingga perlu dilakukan pengendalian agar kenaikan harga komoditas dan transportasi tidak melambung tinggi. Beberapa upaya penanganan inflasi di Kabupaten Banyumas dalam rangka ketahanan pangan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah
- 2) Pembangunan/Optimalisasi pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)  
Pembangunan lumbung dan sarana pendukungnya (Gudang Lumbung, Lantai Jemur, Rumah *Rice Milling Unit* (RMU)/penggilingan padi, Rumah *Bed Dryer*, Mesin *Rice Milling Unit* (RMU), Mesin *Bed Dryer*) ditambah dengan pengisian lumbung untuk penguatan cadangan pangan @17,64 ton Gabah Kering Giling (GKG) yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi.
- 3) Pelaksanaan Gerakan Tanam Cabai
  - Pembuatan bibit cabai dalam polybag sebanyak 75.000 bibit di UPT Balai Benih Pertanian;
  - Pengadaan bibit cabai sebanyak 17.000 bibit melalui Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan Berbasis sumber daya lokal;
  - Gerakan tanam cabai dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 4.400 bibit di berikan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT)/Masyarakat;
  - Pembagian bibit cabai dari BPP sejumlah 27.740 bibit;
  - Pembagian bibit cabai sebanyak 180 sachet;
- 4) Pembagian bantuan benih padi super genjah varietas Cakrabuana (umur panen pendek).

Gambar 3.8.

Gerakan Tanam Jagung yang dipimpin oleh Wakil Bupati Banyumas



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2022

Gambar 3.9.

Pembukaan Gerakan Pangan Murah oleh Bupati Banyumas



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2022

Pencapaian tujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis didukung oleh 5 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 30.035.741.106,- dan realisasi sebesar Rp. 28.170.385.070,- sehingga rata-

rata capaian realisasi anggaran sebesar 93,79%. Dari ke-5 program yang mendukung, anggaran masing-masing program dapat terealisasi lebih dari 80%.

## 6. TUJUAN 6 : Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja

Untuk memperluas lapangan kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya mengembangkan kawasan industri. Beberapa kajian dan regulasi telah disusun untuk mendukung terwujudnya kawasan industri di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (2011-2031) yang masih berlaku hingga saat ini terdapat total luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) kurang lebih 500 Ha yang berada tersebar di Kecamatan Ajibarang, Wangon, Sokaraja, dan Kemranjen.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja, maka ditetapkan 3 (tiga) indikator yaitu Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Secara lebih rinci realisasi capaian kinerja Tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.15.

Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2022
		Target	Realisasi	%		
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	2	60,32	3.016	2	3.016
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,00	6,05	79	4,5	65,56
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,06	63,81	99,61	64,15	99,47

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan Tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut :

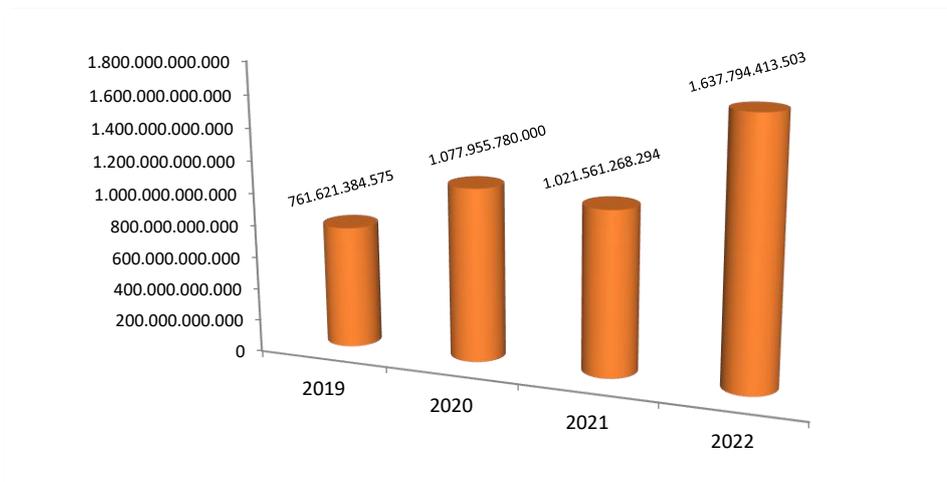
**a) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah**

Investasi memegang peran penting dan kunci dalam membangun perekonomian dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan pada era pasca pandemi COVID-19. Keberadaan penanam modal (investor) dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas.

Capaian indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dapat dilihat dari pertumbuhan nilai investasi dan pencapaian selama kurun waktu tahun 2019-2022 disajikan pada grafik berikut ini:

Grafik 3.14.

Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Banyumas  
Tahun 2019-2022



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Banyumas, 2022

Capaian Realisasi indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah Tahun 2022 diatas, telah melampaui target yang telah ditetapkan pada RPJMD 2018-2023.

Nilai investasi tahun 2022 yaitu Rp. 1,637 triliun, sudah melebihi target yang di tetapkan pada RPJMD 2018-2023 yaitu sebesar Rp 545 miliar. Pencapaian ini juga melampaui target investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp 1,270 triliun.

Pencapaian realisasi investasi pada Tahun 2022 terdiri dari sektor primer (pertanian dan pengolahan hasil pertanian), sektor sekunder (kontruksi, industri dan pertambangan) serta sektor tersier (hotel, restoran, pergudangan, perdagangan dan jasa). Pencapaian investasi terbesar pada sektor tersier dengan nilai investasi sebesar Rp 1.246.117.393.363,- dari total investasi sebesar Rp 1.637.794.413.503,-. Nilai capaian investasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16.

Jumlah Realisasi Investasi berdasarkan sektor Tahun 2022

No.	Sektor	PMA	PMDN	JUMLAH
1	Sektor Primer	-	31.183.085.000	31.183.085.000
2	Sektor Sekunder	47.354.994	360.446.580.145	360.493.935.139
3	Sektor Tersier	11.405.378.477	1.234.712.014.886	1.246.117.393.363
<b>JUMLAH</b>		<b>11.452.733.472</b>	<b>1.626.341.680.031</b>	<b>1.637.794.413.503</b>

Sumber : DPMPTSP, 2022

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Banyumas terus didorong dengan berbagai strategi yang telah dilakukan antara lain :

- a) Dengan mengoptimalkan kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan LKPM.
- b) Dilakukan pengembangan promosi melalui digital promotion dengan platform media sosial.
- c) Memberikan kemudahan perizinan terhadap investasi baru.
- d) Peningkatan pelayanan perizinan juga terus dioptimalkan melalui pendampingan OSS.
- e) Memberikan layanan secara jemput bola (Gelas Umi Kece/Gerakan Legalisasi Usaha Kecil Mikro Banyumas).

#### **b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

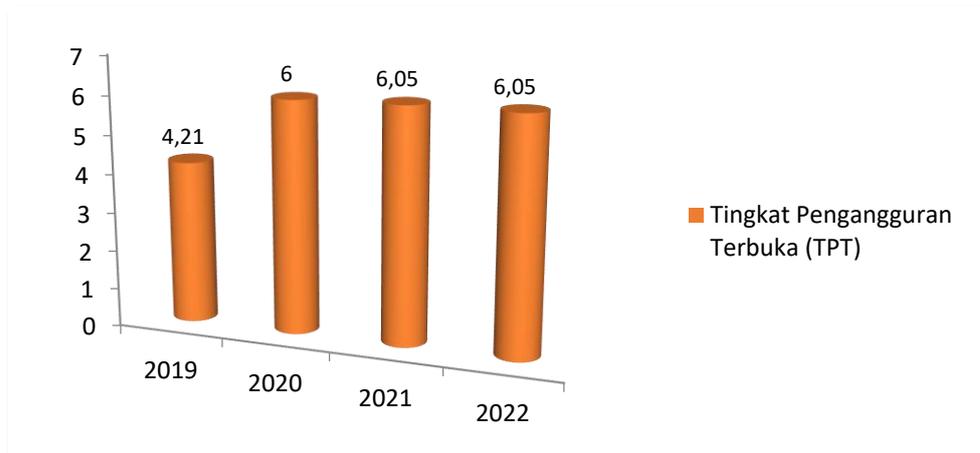
Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Tantangan pengurangan pengangguran adalah bagaimana meningkatkan penanaman modal atau investasi sehingga dapat menciptakan lapangan

kerja bagi masyarakat yang didukung dengan kebijakan penanaman modal yang sehat, kompetitif dan saling menguntungkan.

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 selama kurun waktu tahun 2019-2022 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.15.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022

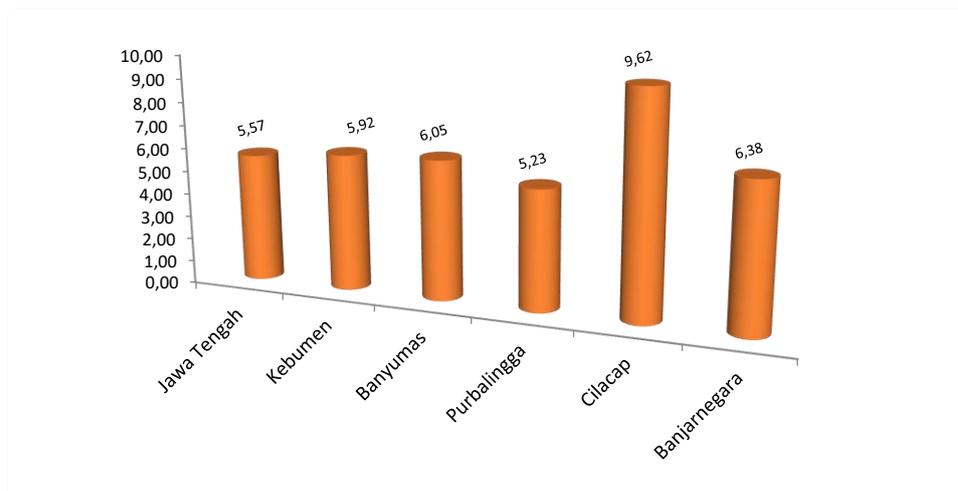


Sumber : Dinakerkop UKM Kab. Banyumas, 2022

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar adalah sebagai berikut :

Grafik 3.16.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

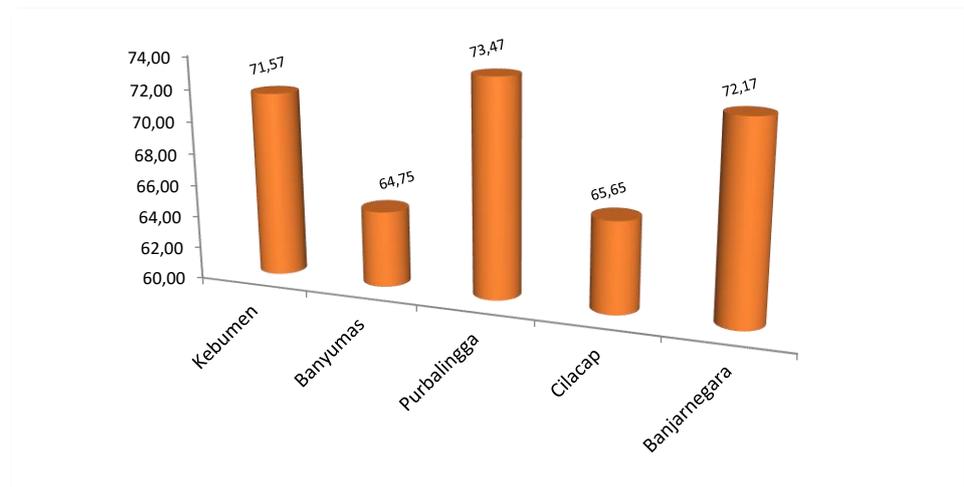


Sumber : Dinakerkop UKM Kab. Banyumas, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka dipengaruhi oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (labor supply) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Grafik 3.17.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 antara lain :

- 1) Kesempatan kerja masih kurang karena :
  - a) Masih ada beberapa perusahaan bersifat padat karya yang belum melaksanakan perekrutan, dikarenakan masih dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19.
  - b) Perusahaan yang masuk dalam kategori baru (kurang dari 3 tahun) melaksanakan perekrutan pekerja secara bertahap.
  - c) Masih kurangnya perusahaan yang bersifat padat karya di Kabupaten Banyumas yang mampu menampung pencari kerja khususnya yang berpendidikan SMK/SLTA ke bawah.

- 2) Masih kurangnya kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kualitas yang dibutuhkan oleh dunia kerja/dunia usaha..

Dalam rangka mengatasi tingkat pengangguran terbuka, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mencari peluang kerja/kesempatan kerja baik di Kabupaten Banyumas maupun di luar Kabupaten Banyumas (*Job Canvasing*);
- 2) Penguatan lembaga-lembaga penempatan kerja baik di dalam maupun diluar negeri;
- 3) Menyelenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*);
- 4) Meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi;
- 5) Telah membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) untuk memaksimalkan penyerapan alumni pelatihan pada dunia industri;
- 6) Memanfaatkan kerjasama penempatan antara perusahaan dengan Bursa Kerja Khusus (BKK).

Gambar 3.10.

Pelaksanaan Kegiatan Job Fair 2022



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2022

### c) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan

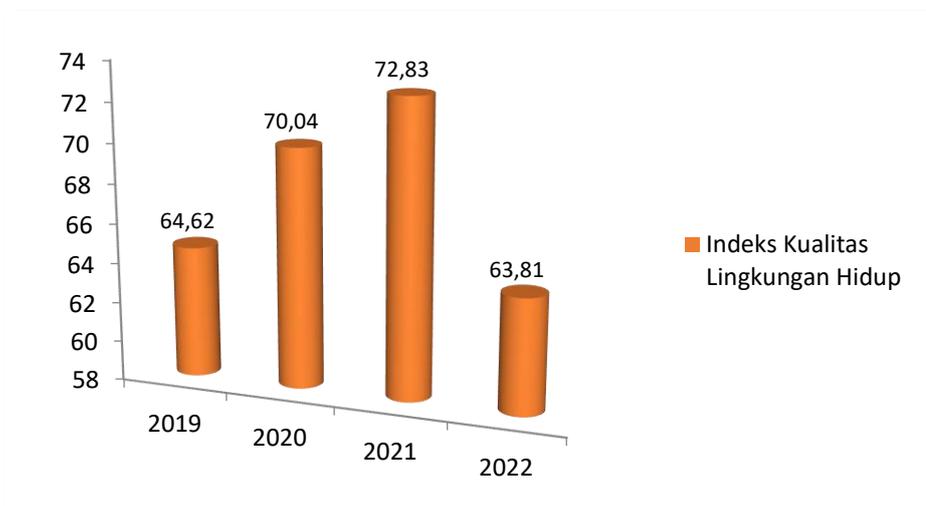
gambaran atau indikasi awal untuk memberikan kesimpulan dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Komponen penyusun dari IKLH terdiri dari indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). IKLH telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2022, Nilai IKA Kabupaten Banyumas sebesar 51,74 (Status SEDANG), Nilai IKU sebesar 86,04 (Klasifikasi BAIK), sedangkan Nilai IKTL sebesar 43,44 (Kategori Kurang). Hasil kalkulasi dari ketiga indeks tersebut menghasilkan Nilai IKLH 2022 Kabupaten Banyumas sebesar **63,81 (Predikat SEDANG)**.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2019-2022 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.18.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022



Sumber : DLH Kabupaten Banyumas, 2022

Capaian IKLH tahun 2022 cenderung menurun dari tahun 2021 karena ada perubahan perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021. Dengan demikian capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya,



karena perbedaan metode perhitungan yang berpengaruh cukup signifikan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara lain :

- 1) Indeks kualitas air tidak memenuhi target salah satunya karena masih banyak masyarakat yang membuang limbah domestik dan buang air besar/kecil di sungai;
- 2) Masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan karena kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- 3) Adanya aktivitas yang tidak mengindahkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan, adanya perambahan hutan, kurangnya ruang terbuka hijau publik dapat menurunkan tutupan lahan

Solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara lain sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi berkelanjutan terutama menyadarkan masyarakat yang masih buang limbah domestik/sampah ke sungai dan menggalakkan *Open Defecation Free* (ODF).
- 2) Pemerintah melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan IKLH, seperti pengurangan beban pencemar, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, dan upaya lain dalam rangka pencegahan pencemaran.
- 3) Melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan bibit tanaman , dan meningkatkan konservasi sumber daya alam keanekaragaman hayati.

Gambar 3.11.

Sosialisasi Larangan Belanja Pakai Kantong Plastik



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2022

Selain langkah-langkah tersebut, pencapaian tujuan perwujudan Kawasan peruntukan industri dan Kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja didukung oleh 21 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 69.735.204.897,- dan realisasi sebesar Rp. 67.090.832.469,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 96,21%. Dari 21 program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 20 program.

**7. TUJUAN 7 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat telah ditetapkan 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kinerja Infrastruktur.

Secara lebih rinci realisasi capaian kinerja Tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.17.

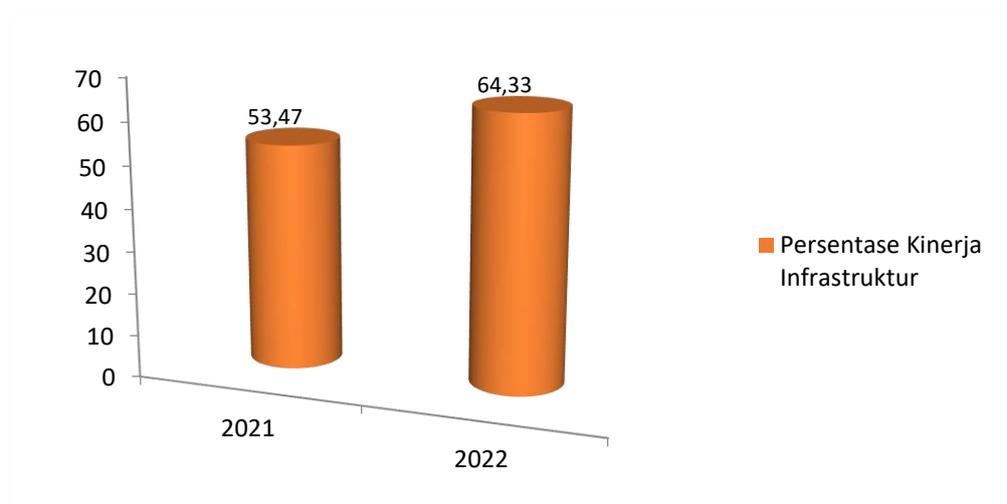
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2022
		Target	Realisasi	%		
Persentase Kinerja Infrastruktur	%	69,33	64,33	92,79	78,87	81,56

Pencapaian Persentase Kinerja Infrastruktur Kabupaten Banyumas pencapaian selama kurun waktu tahun 2021-2022 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.19.

Persentase Kinerja Infrastruktur Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2022



Sumber : Aplikasi e-Monev Kabupaten Banyumas, 2022

Persentase Kinerja Infrastruktur pada tahun 2019 dan 2020 belum menjadi indikator tujuan 7, dengan adanya perubahan RPJMD 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 maka dilakukan penyesuaian indikator dan target pada tujuan 7.

Kinerja infrastruktur menggambarkan tentang kondisi infrastruktur di suatu daerah dengan capaian dari masing-masing komponen. Komponen Kinerja Infrastruktur tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### a) Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap, Kondisi Jaringan Irigasi, dan Sistem Drainase

Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki peran strategis tidak hanya karena terdapat sub bidang yang terkait dengan pelayanan dasar namun juga perannya sebagai pendukung keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2022 yaitu Peningkatan Perekonomian Daerah didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, dibutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas selain jalan desa dan jalan lingkungan adalah 1.716,886 km, dengan prosentase kewenangan jalan terdiri atas jalan kewenangan Kabupaten Banyumas sebesar 87,83%, jalan kewenangan Nasional sebesar 10,24%, dan sisanya merupakan jalan kewenangan Provinsi sebesar 1,93%. Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18.

Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Kondisi	Panjang	%	Kondisi		
Baik	868,549	57,60	1.225,235	81,25%	Mantap
Sedang	356,686	23,65			
Rusak ringan	150,094	9,95	282,765	18,75%	Tidak Mantap
Rusak berat	132,671	8,80			
<b>Jumlah</b>	<b>1.508,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2022

Secara rinci panjang jalan Kabupaten Banyumas dari tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19.

Panjang Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022

Uraian	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)			
	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan kabupaten	1.508	1.508	1.508	1.508
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	37,87	47,51	51,11	57,60
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (%)	25,83	28,76	28,66	23,65



Uraian	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)			
	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan (%)	19,39	9,79	10,03	9,95
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat (%)	16,91	13,93	10,20	8,80

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2022

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar jalan dalam kondisi mantap antara lain :

- 1) Memprioritaskan anggaran pemeliharaan Rutin Jalan untuk penanganan Jalan kondisi Baik dan Sedang;
- 2) Mengupayakan rekonstruksi jalan untuk penanganan jalan dalam kondisi Rusak;
- 3) Mengupayakan penyediaan infrastruktur bangunan pelengkap jalan (drainase, gorong-gorong, talud/turap dll) untuk mengurangi penurunan kondisi jalan;
- 4) Pembaharuan data kondisi jalan secara berkala untuk penanganan yang tepat dan efisien sesuai kondisi riil dilapangan;
- 5) Koordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam pengendalian dan pengaturan kendaraan yang melintas agar sesuai antara berat muatan dan kelas jalan yang ada;
- 6) Mencari dan mengusulkan sumber pendanaan untuk penanganan jalan dari sumber Anggaran lain di luar APBD Kabupaten;
- 7) Meningkatkan peran/partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jalan dalam wadah Forum Masyarakat Peduli Jalan (Formas Pejal).

Gambar 3.12.

Pembangunan Jembatan Pegalongan-Mandirancan



Sumber : Humas Kabupaten Banyumas, 2022

Untuk mendukung Hasta Krida Bupati Banyumas terpilih yaitu pengembangan pertanian, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi, jaringan irigasi menjadi kegiatan prioritas pada tahun-tahun yang akan datang.

Kondisi infrastruktur irigasi Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20.

Kondisi infrastruktur irigasi Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022

Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi (m)				Jumlah
	Baik	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	
Saluran Primer	304.490	26.126	9.130	53.307	393.054
Saluran Sekunder	235.076	2.011	7.611	26.688	271.386

Pada Kabupaten Banyumas, panjang drainase yang dikelola sepanjang 150,38 km, pada tahun 2022 mencapai 112,432 km (74,77%) semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Keberadaan drainase sebagai pendukung prasarana jalan sangat diperlukan agar tidak terjadi genangan serta aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri.

Gambar 3.13.

Pembangunan Saluran Air di Legok, Kecamatan Pekuncen



Sumber : Humas Kabupaten Banyumas, 2022

Terkait drainase, Kabupaten Banyumas melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan genangan di jalan, antara lain :

- 1) Mulai dari pemasangan peresapan air di jalan-jalan, pemasangan grill, manhole dan lain-lain.
- 2) Pada tahun 2022 ada 6 titik yang dekat dengan perputaran ekonomi masyarakat yang dilakukan pembangunan ataupun perbaikan drainase yaitu Pasar Legok, Kecamatan Pekuncen, Pasar Cilongok, Jln.Mohamad Besar Pabuaran, Jln.Syekh Makdum Wali Kecamatan Karanglewas, Jln. Kol Sugiono serta di Martadirjan.
- 3) Pembangunan sistem drainase, rehabilitasi saluran drainase, serta pemeliharaan.
- 4) Pembangunan talud pengaman drainase di Desa Kedungwuluh Lor, Kecamatan Patikraja

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pekerjaan Umum tidak bosan-bosan untuk terus mengimbau dan melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terlebih di saluran air ataupun sungai dan taat terhadap aturan Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS), sehingga akan memudahkan pemeliharaan dan antisipasi sumbatan saluran yang menyebabkan banjir.

## b) Rumah tangga pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi

Pelaksanaan atas Hasta Krida keenam yaitu pembangunan infrastruktur merata dan memadai untuk mewujudkan peningkatan anggaran irigasi, peningkatan jalan hotmix 570 km, dan membangun pasar desa. Dalam rangka mewujudkan Hasta Krida ke-6 tersebut, maka telah dilaksanakan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman. Kondisi pelayanan air bersih dan sanitasi yang merupakan kebutuhan dasar penduduk sampai dengan tahun 2022 masih belum mencakup seluruh penduduk di Kabupaten Banyumas.

Tabel 3.21.

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Rumah Tangga Bersanitasi  
Tahun 2019-2022

No.	Uraian	Capaian Kinerja Setiap Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	334.674	337.553	343.986	351.306
2.	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih (%)	73,71	74,22	75,51	76,99
3.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	87,79	88,45	83,83	90,00

Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas , 2022

Tingginya penduduk miskin merupakan akar permasalahan tingginya jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas. Penduduk miskin memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya produktivitas yang mengakibatkan penghasilan juga rendah. Perkembangan rasio rumah layak huni dan lingkungan kumuh perkotaan Kabupaten Banyumas tahun 2019-2022 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3.22.

Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni dan Lingkungan Kumuh  
Perkotaan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Rasio rumah layak huni (%)	78,47	78,76	79,17	79,97



No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
2.	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha di Kab/Kota yang ditangani (%)	N/A	N/A	6,12	5,75

Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2022

Rumah sederhana layak huni, dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat yaitu Pasar Legok, Kecamatan Pekuncen, Pasar Cilongok, Jln.Mohamad Besar Pabuaran, Jln.Syekh Makdum Wali Kecamatan Karanglewas, Jln. Kol Sugiono serta di Martadirjan. Meskipun tingkat kepemilikan rumah tinggi, dari aspek kelayakan masih terdapat rumah tidak layak huni dan rumah tanpa akses air minum dan sanitasi.

Selain melakukan rehab terhadap rumah tidak layak huni, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka peningkatan rumah tangga pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi antara lain :

- 1) Program Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- 2) Pemberian bantuan pembangunan Tangki Septik Individual dan Komunal.
- 3) Pemberian bantuan peningkatan, perluasan, dan pembangunan sambungan rumah (SR) Jaringan Perpipaan Air Minum.

Gambar 3.14.

Bupati Banyumas Meresmikan Program Pembangunan RTLH di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok



Sumber : Hums Kabupaten Banyumas, 2022

### c) Sarana Perhubungan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan di Kabupaten Banyumas diarahkan guna mendukung pencapaian tujuan dinas tersebut dan mendukung arah kebijakan dan strategi nasional penyediaan infrastruktur dasar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi. Kebijakan keselamatan transportasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 difokuskan pada keselamatan lalu lintas jalan mengingat tingginya jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan melalui pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas.

Upaya untuk mendukung kegiatan di bidang perhubungan adalah dengan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi serta dengan mendorong produktifitas daerah dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya terminal diharapkan upaya tersebut dapat tercapai. Kabupaten Banyumas memiliki 2 (dua) terminal Tipe C yaitu Terminal Penumpang Wangon dan Ajibarang. Selain itu, Dinas Perhubungan



Kabupaten Banyumas juga mengelola Terminal Bulupitu. Untuk terminal Type C masih belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Jalan.

Untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan meningkatkan konektivitas wilayah Dinas Perhubungan akan mengembangkan angkutan sungai dan angkutan massal perkotaan melalui program *Buy The Service* (BTS). Program *Buy The Service* (Pembelian Layanan) untuk angkutan massal perkotaan dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal atau *quality licensing* bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Program *Buy The Service* (BTS) antara Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di Pendopo Si Panji. Nota Kesepakatan dengan Nomor: HK/201/8/7/DJPD/2020 dan Nomor: 550/65/220 tentang Perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum perkotaan di Kabupaten Banyumas. Program BTS dilatarbelakangi dengan permasalahan kemacetan serta tidak tertatanya sistem transportasi publik yang baik sehingga menyebabkan pemborosan, permasalahan lingkungan kerugian ekonomi, hingga kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain angkutan massal perkotaan merupakan *public goods*, sehingga Pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Pada Tanggal 5 Desember 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan BTS ini sebanyak 52 Bus dengan 3 Koridor. Program BTS diluncurkan di 5 (lima) kota yaitu : Surabaya, Bandung, Makassar, Banjarmasin dan Banyumas.

Penyelenggaraan angkutan sungai merupakan upaya pemanfaatan potensi Sungai Serayu sebagai jalur transportasi dan hibah pemerintah untuk pengembangan angkutan sungai. Pada Tahun 2022 Kabupaten Banyumas direncanakan dermaga yang dibangun dan di operasionalkan ada 3 Halte Sungai (Halte Sungai Papringan, Halte Sungai Tambaknegara, dan Halte Sungai Kedunguter). Namun yang terealisasi hanya ada 2 Halte Sungai, yakni Halte Sungai Tambaknegara

dan Halte Sungai Papringan. Dimana Pelabuhan Kedunguter belum terealisasi dikarenakan anggaran APBN dari Kementerian Perhubungan belum bisa digunakan karena terdapat perubahan titik lokasi Pelabuhan Kedunguter dan perlu adanya perubahan DED yang sesuai dengan titik lokasi Pelabuhan yang sesuai dengan rekomtek BBWSSO (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak).

Gambar 3.15.

Kapal Angkutan Sungai Serayu Kabupaten Banyumas (Angsamas)



Sumber : Hums Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 3.16.

Bus Trans Banyumas



Sumber : Hums Kabupaten Banyumas, 2022

Tercapainya tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat didukung oleh 13 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 424.929.078.993,- dan realisasi sebesar Rp. 400.309.689.078,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 94,21%. Dari ke-13 program yang mendukung, anggaran masing-masing program dapat terealisasi lebih dari 80%.

## 8. TUJUAN 8 : Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi telah ditetapkan indikator berupa Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam jenisnya, umumnya mudah dijangkau karena didukung sarana dan prasarana yang memadai. Kabupaten Banyumas telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyumas (RIPPARKAB) Tahun 2018-2033 yang menetapkan Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP).

Secara lebih rinci realisasi capaian Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.23.

Capaian Kinerja Tujuan Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2022
		Target	Realisasi	%		
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	5	6,38	127,6	7	91,14

Kontribusi sektor pariwisata terdiri dari pajak hotel, pajak restoran dan retribusi pariwisata yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.24.

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Tahun 2022

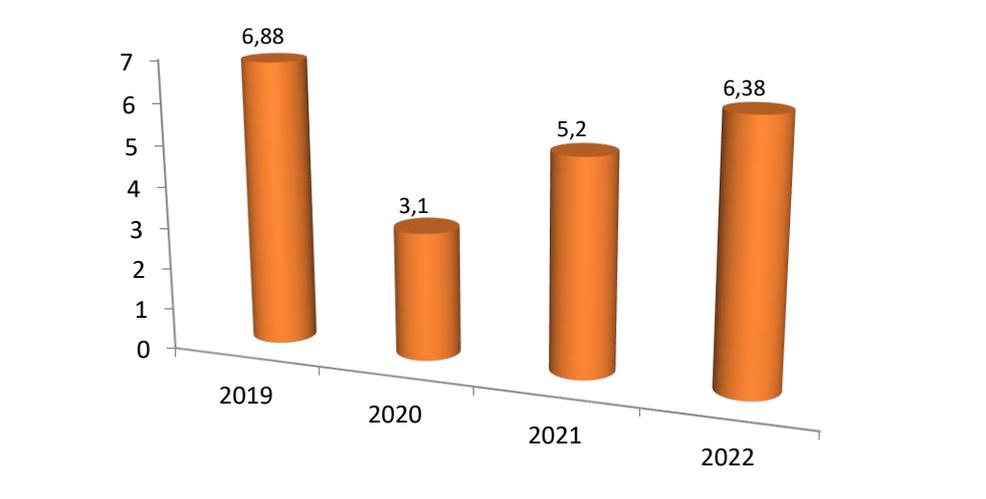
No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	PAD	<b>697.496.236.093</b>
1	Pajak Hotel	11.689.152.409
2	Pajak Restoran	30.060.437.036
3	Retribusi Pariwisata	2.727.071.000
	Total Kontribusi Pariwisata	<b>44.476.660.445</b>
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<b>6,38</b>

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2022

Adapun realisasi indikator kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2019-2022 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.20.

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022



Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2022

Dampak Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 telah berdampak sangat besar terhadap berbagai sektor perekonomian di Kabupaten Banyumas, salah satunya pariwisata. Keterpurukan sektor



pariwisata selama pandemi tersebut makin diperparah dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berdampak terhadap penurunan kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata. Selain karena tidak adanya kunjungan wisatawan, kebijakan PPKM pun membatasi penyelenggaraan kegiatan di hotel maupun restoran. Bahkan, restoran pun tidak boleh melayani pengunjung untuk makan di tempat.

Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah memberikan sejumlah kelonggaran terhadap pelaksanaan PPKM, sehingga geliat perekonomian di berbagai daerah, termasuk Banyumas bangkit. Upaya pemulihan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata, telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak tahun 2021. Kendati saat itu pandemi belum diketahui kapan akan berakhir, Pemerintah Kabupaten Banyumas memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah kepada sebuah perusahaan multiinfrastruktur sebesar Rp191,92 miliar. Dengan berbekal dana PEN tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas langsung "tancap gas" untuk merealisasikan tujuan dari pengajuan pinjaman itu. Dana tersebut digunakan untuk membangun sejumlah objek wisata baru, beberapa objek wisata yang dibangun dengan menggunakan dana PEN, seperti Menara Teratai, Madhang Maning Park, dan Taman Mas Kemambang, Taman Botani dan Kawasan Indraprana di Baturraden.

Langkah-langkah yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata antara lain :

- a) Meluncurkan aplikasi berbasis android Dolan Banyumas  
Dimana aplikasi ini berisi informasi pariwisata antara lain destinasi wisata, kuliner, penginapan, pusat oleh-oleh, desa wisata beserta paket wisatanya dan daftar biro perjalanan yang ada di Kabupaten Banyumas.
- b) Kemudahan investor pariwisata dalam mengurus perizinan.
- c) Melakukan promosi wisata melalui media sosial maupun pameran.
- d) Memberikan fasilitas gratis tiket masuk Lokawisata Baturraden, Taman Mas Kemambang, dan Menara Teratai bagi anak usia 0-5 tahun dan tiket masuk bagi anak berusia 6-12 tahun diberlakukan sebesar 50 persen dari tarif pengunjung dewasa.
- e) Menggandeng sejumlah hotel berbintang yang ada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Hotel-hotel berbintang tersebut menayangkan



video promo objek wisata yang ada di Kabupaten Banyumas pada layar televisi yang terpasang di kamar-kamar hotel, dengan harapan dapat menumbuhkan minat tamu hotel untuk mengunjungi objek wisata itu.

- f) Dilaksanakannya acara yang dihadiri oleh masyarakat di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Banyumas.

Selain hal tersebut, langkah lain yang ditempuh dalam mendukung pencapaian indikator urusan pariwisata adalah melalui pengembangan desa wisata. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2022 sebanyak 21 (dua puluh satu) desa dari 301 desa yang ada. 21 Desa Wisata tersebut yang telah ditetapkan oleh Bupati Banyumas melalui SK Bupati Banyumas adalah :

1. Desa Wisata Cikakak;
2. Desa Wisata Kalisalak;
3. Desa Wisata Karangsalam;
4. Desa Wisata Karangtengah;
5. Desa Wisata Melung;
6. Desa Wisata Darmakradenan;
7. Desa Wisata Banjarpanepen;
8. Desa Wisata Karangkemiri;
9. Desa Wisata Petahunan;
10. Desa Wisata Samudra;
11. Desa Wisata Gerduren;
12. Desa Wisata Karanggintung;
13. Desa Wisata Kalibagor;
14. Desa Wisata Cirahab;
15. Desa Wisata Kemitug Lor;
16. Desa Wisata Pekunden;
17. Desa Wisata Kejawar;
18. Desa Wisata Tamansari;
19. Desa Wisata Pekuncen;
20. Desa Wisata Tambaknegara;
21. Desa Wisata Glempang.

Pengembangan desa wisata sangat potensial untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Pada tahun 2022 Desa Wisata Pekunden Kecamatan Banyumas mendapat penghargaan sebagai Desa Wisata terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam ajang Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2022.

Gambar 3.17.

Peresmian Taman Botani oleh Bupati Banyumas



Sumber : Hums Kabupaten Banyumas, 2022

Perkembangan jumlah wisatawan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25.

Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Banyumas

Tahun 2019-2022

Uraian	Sat	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
<b>Jumlah Kunjungan wisata</b>	org	3.580.743	1.866.157	1.466.580	2.656.579
<b>a. Wisatawan Nusantara</b>	org	3.580.485	1.866.083	1.466.571	2.656.540
<b>b. Wisatawan Mancanegara</b>	org	258	74	9	39

Sumber : Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2021

Selain sektor wisata, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga mengembangkan ekonomi kreatif. Pemerintah Kabupaten Banyumas



melaksanakan prinsip pengembangan ekonomi kreatif dengan menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 meliputi :

- 1) Pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.
- 2) Peningkatan literasi mengenai pola pikir desain bertujuan untuk mentransformasikan kreativitas menjadi inovasi.
- 3) Penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri, persatuan dan kesatuan, serta eksistensi bangsa Indonesia di forum internasional.
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan presentasi karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas untuk meningkatkan apresiasi dan pengakuan masyarakat Indonesia dan dunia.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif, langkah-langkah yang ditempuh antara lain :

- 1) Peningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaku industri kreatif, dengan melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi/pendampingan dalam rangka pengembangan industri kreatif.
- 2) Peningkatan penggunaan teknologi dalam mengembangkan industri kreatif.
- 3) Fasilitasi event-event pameran, baik tingkat provinsi dan nasional dalam rangka pemasaran produk dan menumbuhkan pangsa pasar bagi industri kreatif.

Gambar 3.18.  
Banyumas Fashion Show



Sumber : Hums Kabupaten Banyumas, 2022

Tercapainya tujuan menumbuhkan dan mengembangkan daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif didukung oleh 10 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 14.767.818.500,- dan realisasi sebesar Rp. 14.213.339.303,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 96,25%. Dari 10 program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 7 program.

#### **9. TUJUAN 9 : Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat**

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator utama, yaitu angka kriminalitas.

Secara lebih rinci realisasi capaian Angka Kriminalitas adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.27.

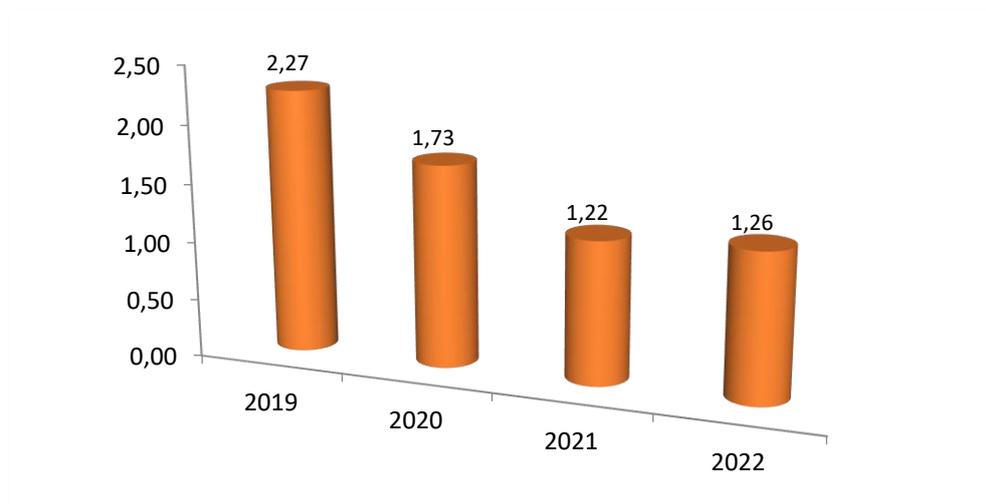
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2022
		Target	Realisasi	%		
Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,586	1,26	120,55	1,516	116,89

Capaian Angka Kriminalitas Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2019-2022 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.21.

Angka Kriminal Kabupaten Banyumas tahun 2019-2022  
(per 10.000 Penduduk)



Sumber : E-Monev Kabupaten Banyumas, 2022

Angka kriminalitas menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Kondusifitas wilayah diperlukan agar kegiatan usaha yang dilakukan akan berkembang dan memberikan keuntungan bagi investor dan mendatangkan nilai tambah ekonomi pada suatu daerah.

Berdasarkan data kejahatan, jumlah kejahatan yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 mengalami penurunan. Data kejahatan secara rinci tersaji dalam tabel berikut :



Tabel. 3.27.

Data Kejahatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2022

No.	Jenis Kejahatan	2021		2022	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1	Currat	64	25	55	49
2	Curranmor	89	29	54	50
3	Narkoba	76	76	89	89
4	Anirat	5	4	2	2
5	Curras	3	2	6	5
6	Pembakaran	1	1	0	0
7	Perkosaan	1	1	3	3
8	Pembunuhan	0	0	1	1
9	Uang Palsu	0	0	1	1
10	Penipuan	23	15	39	32
11	Perjudian	19	19	11	11
	Jumlah	281	172	258	240

Sumber : POLRESTA Banyumas, 2022

Dalam rangka menurunkan angka kriminalitas, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan beberapa upaya diantaranya adalah :

- Memberdayakan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar antara lain dengan menggalakkan ronda malam (siskamling) dan pembangunan pos keamanan lingkungan (poskamling).
- Meningkatkan peran serta pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar.
- Memberlakukan aturan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan.
- Menumbuhkan kerja sama yang solid antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sebagai upaya pencegahan preventif.

Kasus narkoba di Kabupaten Banyumas mengalami tren kenaikan 13,2 persen, yakni dari 76 kasus dengan 91 tersangka pada 2021 menjadi 86 kasus dengan 108 tersangka pada 2022. Berdasarkan hasil pemetaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Banyumas terhadap kawasan kerawanan narkoba di 331 desa dan kelurahan di Banyumas, sebanyak 172 desa dengan status aman (52 persen), status siaga 102 desa (30,8 persen), status waspada 49 desa (14,8 persen), bahaya 8 desa (2,4 persen). Upaya yang dilakukan untuk membrantas kasus narkoba antara lain :



- a. Dilakukan penyuluhan pada masyarakat.
- b. Pelaksanaan tes urine di instansi pemerintahan.
- c. Pelaksanaan tes urine di lingkungan pendidikan.
- d. Pelaksanaan tes urine di masyarakat dan di lingkungan swasta.
- e. Pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- f. Pelaksanaan Program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba.
- g. Meningkatkan Kapasitas Rehabilitasi dengan menyediakan layanan rehabilitasi rawat inap sesuai dengan Standar Nasional Rehabilitasi SNI.

Selain langkah-langkah diatas, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, telah pula melaksanakan langkah-langkah antara lain :

- a) Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara.
- b) Peningkatan kualitas fasilitasi pelayanan keagamaan dengan memakmurkan Pesantren, Masjid serta tempat-tempat ibadah lainnya serta meningkatkan peran forum komunikasi, dialog, dan diskusi antar umat beragama.
- c) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan penegakan Perda/Perbup dan mengoptimalkan pelayanan keamanan masyarakat.
- d) Meningkatkan pelestarian budaya dengan fasilitasi, pelestarian dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya.
- e) Melaksanakan koordinasi bersama Forkompinda dalam upaya deteksi dini potensi konflik sosial di masyarakat.

Gambar 3.19.  
Forkompinda dan Forum Kerukunan Umat Beragama Mengikuti Gowes Bersama Kerukunan



Sumber : Hums Kabupaten Banyumas, 2022

Tercapainya tujuan meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat didukung oleh 17 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 60.687.068.266,- dan realisasi sebesar Rp. 57.635.288.257,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 94,97%. Dari 17 program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 15 program.

## B. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28.

Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas  
Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK RI)

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi
1.	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.519.947.807.708</b>	<b>3.165.424.511.375</b>	<b>89,93</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	864.151.372.260	742.884.557.194	85,97
1.2	Pendapatan Transfer	2.645.583.354.052	2.408.478.144.611	91,04



No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.213.081.396	14.061.809.570	137,68
<b>2.</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.956.268.992.204</b>	<b>3.315.787.603.912</b>	<b>83,81</b>
2.1	Belanja Operasi	2.698.706.915.123	2.231.594.178.122	82,69
2.2	Belanja Modal	539.870.327.081	406.555.579.843	75,31
2.3	Belanja Tidak Terduga	39.674.740.000	28.163.884.848	70,99
2.4	Belanja Transfer	678.017.010.000	649.473.961.099	95,79
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>436.321.184.496</b>	<b>436.945.123.266</b>	<b>100,14</b>
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>487.825.184.496</b>	<b>486.691.123.266</b>	<b>99,77</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	369.896.692.236	369.896.692.236	100,00
3.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	116.928.492.260	116.794.431.030	99,89
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	0	0,00
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>51.504.000.000</b>	<b>49.746.000.000</b>	<b>96,59</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	25.004.000.000	24.746.000.000	98,97
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	0	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>436.321.184.496</b>	<b>436.945.123.266</b>	<b>100,14</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>286.582.030.729</b>	<b>0,00</b>

Sumber : BKAD Kabupaten Banyumas, 2022

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29.  
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah  
Kabupaten Banyumas per tujuan/sasaran strategis Tahun 2022

No	Tujuan	Rencana Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.174.667.101.154	1.103.819.309.764	93,97
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat	2.031.972.822.014	1.760.279.474.891	86,63



No	Tujuan	Rencana Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)
	pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat			
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	20.860.847.381	17.432.425.853	83,57
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	71.146.471.345	64.522.915.684	90,69
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	30.035.741.106	28.170.385.070	93,79
6.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	69.735.204.897	67.090.832.469	96,21
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	424.929.078.993	400.309.689.078	94,21
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	14.767.818.500	14.213.339.303	96,25
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	60.687.068.266	57.635.288.257	94,97
<b>JUMLAH</b>		<b>3.898.802.153.656</b>	<b>3.513.473.660.369</b>	<b>90,12</b>

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2022

## 1. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja

Anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian

kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.30.

Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran strategis  
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
<b>MISI 1 .</b> Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat					
1.	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	97,42	1.103.819.309.764	93,97
<b>MISI 2.</b> Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan					
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	101,09	1.760.279.474.891	86,63
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1	90,82	17.432.425.853	83,57
<b>MISI 3 .</b> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan					
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	2	91,61	64.522.915.684	90,69
<b>MISI 4.</b> Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan					
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	106,74	28.170.385.070	93,79
<b>MISI 5.</b> Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan					
6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	3	1.064,87	67.090.832.469	96,21

No	Tujuan/ Sasaran strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
	<b>MISI 6.</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan				
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	92,79	400.309.689.078	94,21
	<b>MISI 7.</b> Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal				
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	1	127,6	14.213.339.303	96,25
	<b>MISI 8.</b> Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius				
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1	120,55	57.635.288.257	94,97

Sumber : *Bagian Organisasi (diolah), 2022*

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 9 tujuan/sasaran strategis, 4 (empat) tujuan/sasaran strategis sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.31.

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
<b>MISI 1 . Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat</b>					
1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	97,42	93,97	-
<b>MISI 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok</b>					
2	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	101,09	86,63	14,46
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1	90,82	83,57	-
<b>MISI 3 . Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan</b>					
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	2	91,61	90,69	-
<b>MISI 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan</b>					
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	106,74	93,79	12,95
<b>MISI 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan</b>					
6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	3	1.064,87	96,21	968,66
<b>MISI 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan</b>					
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	92,79	94,21	-
<b>MISI 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal</b>					
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	1	127,6	96,25	37,35
<b>MISI 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius</b>					
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1	120,55	94,97	25,58

Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2022



Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas bahwa untuk tujuan 1 (satu) yaitu Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi hingga saat ini belum ada data dari Kementerian PAN dan RB, selain itu tujuan 4 (empat) yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dan Non Pertanian dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita hingga saat ini belum rilis dari BPS sehingga data yang disajikan di tabel diatas adalah data tahun 2021. Terdapat 5 (lima) tujuan/sasaran strategis memperoleh hasil persentase rata-rata capaian kinerja melebihi realisasi persentase anggaran, sedangkan 2 (dua) tujuan/sasaran strategis masih kurang efisien, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisiensi penggunaan sumber daya tertinggi dicapai pada tujuan ke 6 (enam) yaitu Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja, dimana realisasi anggaran sebesar 96,21% dapat mencapai prosentase capaian kinerja sebesar 1.105,04%. Efisiensi penggunaan sumber daya Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 didukung oleh hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Dengan mengoptimalkan kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan LKPM.
  - 2) Dilakukan pengembangan promosi melalui digital promotion dengan platform media sosial.
  - 3) Memberikan kemudahan perizinan terhadap investasi baru.
  - 4) Peningkatan pelayanan perizinan juga terus dioptimalkan melalui pendampingan OSS.
  - 5) Memberikan layanan secara jemput bola (Gelas Umi Kece/Gerakan Legalisasi Usaha Kecil Mikro Banyumas).
  - 6) Mencari peluang kerja/kesempatan kerja baik di Kabupaten Banyumas maupun di luar Kabupaten Banyumas (Job Canvasing);
  - 7) Penguatan lembaga-lembaga penempatan kerja baik di dalam maupun diluar negeri;
  - 8) Menyelenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair);
  - 9) Meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi;
  - 10) Telah membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan



- Industri Daerah (FKLPID) untuk memaksimalkan penyerapan alumni pelatihan pada dunia industri;
- 11) Memanfaatkan kerjasama penempatan antara perusahaan dengan Bursa Kerja Khusus (BKK).
  - 12) Sosialisasi berkelanjutan terutama menyadarkan masyarakat yang masih buang limbah domestik/sampah ke sungai dan menggalakkan Open Defecation Free (ODF).
  - 13) Pemerintah melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan IKLH, seperti pengurangan beban pencemar, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, dan upaya lain dalam rangka pencegahan pencemaran.
  - 14) Melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan bibit tanaman, dan meningkatkan konservasi sumber daya alam keanekaragaman hayati.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 paling rendah pada tujuan ke-7 (tujuh) , dimana indikator tujuan ke-7 yaitu Persentase Kinerja Infrastruktur, dengan realisasi 92,79%. Dengan curah hujan yang tinggi di Kabupaten Banyumas yang mengakibatkan banjir, maka berimbas juga pada infrastruktur di Kabupaten Banyumas yaitu rusaknya jalan dan jembatan.

## **2. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja tertinggi salah satunya dukungan program dan kegiatan. Penjelasan kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Dalam urusan penanaman modal, didukung oleh program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, program pengembangan iklim penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program promosi penanaman modal. Untuk mendukung program tersebut dijabarkan dalam kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah



Kabupaten/ Kota, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Upaya yang ditempuh dengan :

- 1) Memberikan kemudahan periiinan terhadap investasi baru.
  - 2) Peningkatan pelayanan perizinan juga terus dioptimalkan melalui pendampingan OSS
  - 3) Memberikan layanan secara jemput bola (Gelas Umi Kece/Gerakan Legalisasi Usaha Kecil Mikro Banyumas).
- b) Dalam urusan tenaga kerja, koperasi dan UKM yang mendukung capaian kinerja yaitu Program penempatan tenaga kerja, program pembangunan kawasan transmigrasi, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program hubungan industrial, program perencanaan tenaga kerja. Upaya yang ditempuh dengan :
- 1) Menyelenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*);
  - 2) Meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi;
  - 3) Telah membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) untuk memaksimalkan penyerapan alumni pelatihan pada dunia industri;
  - 4) Memanfaatkan kerjasama penempatan antara perusahaan dengan Bursa Kerja Khusus (BKK).
- c) Dalam urusan lingkungan hidup, yang mendukung capaian kinerja yaitu Program pengelolaan persampahan, program pengelolaan keanekaragam hayati, program pembinaan dan pengawasan terhadap iin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, program perencanaan lingkungan hidup, prorgam peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, progrm pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), program penanganan pengaduan lingkungan hidup. Upaya yang ditempuh dengan :
- 1) Sosialisasi berkelanjutan terutama menyadarkan masyarakat yang masih buang limbah domestik/sampah ke sungai dan menggalakkan *Open Defecation Free* (ODF).
  - 2) Pemerintah melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan IKLH, seperti pengurangan beban pencemar,



pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, dan upaya lain dalam rangka pencegahan pencemaran.

- 3) Melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan bibit tanaman, dan meningkatkan konservasi sumber daya alam keanekaragaman hayati.

### 3. Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2022, telah dilaksanakan sebanyak 118 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp 183.995.768.313,94, realisasi nilai kontrak sebesar Rp 166.406.528.553,82, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 17.589.239.760,12 atau 9,56%.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-Catalog* dilaksanakan dengan metode *e-Purchasing* dan pada tahun 2022 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas telah melaksanakan sebanyak 118 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp 185.502.768.759,00, realisasi pengadaan sebesar Rp 166.406.528.553,82, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 19.096.240.205,18 atau 10,29%.

Ditengah kesibukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Kabupaten Banyumas tetap berprestasi yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas sepanjang kurun waktu Tahun 2022, diantaranya :

Tabel 3.32.

Daftar Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas  
Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Penerima
1	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (11 kali berturut-turut)	BPK RI	Pemkab Banyumas
2	KIPP Nasional TOP 45	Kementerian PAN dan RB	DLH
	KIPP Nasional TOP 99	Kementerian PAN dan RB	Dindik
3	Penghargaan Kepatuhan Tinggi Bidang Pelayanan Publik Peringkat ke 3 Nasional	Ombudsman RI	Pemkab Banyumas
4	Evaluasi Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima	Kementerian PAN dan RB	DPMPSTP
	Evaluasi Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima	Kementerian PAN dan RB	Dindukcapil
5	Pembina Pelayanan Publik Prima	Kementerian PAN dan RB	Bupati Banyumas
6	SAKIP dan RB kategori BB	Kementerian PAN dan RB	Pemkab Banyumas
7	Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	Kemenkumham	Pemkab Banyumas
8	Penghargaan Bakti Ekonomi Desa	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal	Pemkab Banyumas
9	Indeks Pengelolaan Keuangan kategori Baik/A	Provinsi Jawa Tengah	BKAD
10	Keterbukaan Informasi Publik kategori Informatif	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Dinkominfo
11	Kinerja Pengawasan Pemerintah Daerah terbaik Peringkat 1	Provinsi Jawa Tengah	Inspektorat Daerah
12	Lomba Hari Habitat Juara 2	Disperkim Provinsi Jawa Tengah	Dinperkim
13	Sharing Activity Terbaik Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Wilayah (PISEW)	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	Dinperkim



No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Penerima
14	Railways Safety Awards kategori Peran Aktif	Kemenhub Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Dinhub
15	Lomba Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Kambing Juara 2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Dinkannak
16	Nirwasita Tantra Kategori Kabupaten Besar	Kementerian Lingkungan Hidup	Pemkab Banyumas
	Nirwasita Tantra Kategori DPRD	Kementerian Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten Bayumas
17	Penghargaan Green Leadershio Nirwasita Tantra kategori Pemerintahan Daerah	Kementerian Lingkungan Hidup	Pemkab Banyumas
18	Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Juara 1	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Dinporabudpar
19	Dinas Pendidikan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah	BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Tengah	Dindik
20	Rancang Busana Berbahan Tenun Atau Lurik Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Juara Harapan I	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Dinperindag
21	Penghargaan Primaniyarta Kategori Eksportir Pemula Pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2022	Kementrian Perdagangan	Dinperindag
22	Festival Fashion Banyumas Raya Juara I Dan Juara III	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	Dinperindag
23	Sekolah Adiwiyata Nasional untuk SMPN 2 Kemrajen, SMPN 1 Lumbir dan SMA N 1 Sokaraja	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DLH
24	Sekolah Adiwiyata Provinsi untuk SDN 1 Bobosan, SMPN 2 Ajibarang, SMPN 2 Purwokerto, SMPN 1 Kedungbanteng, SMAN 3 Purwokerto	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa	DLH



No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Penerima
		Tengah	
25	Juara 2 Lomba Pengelolaan Ecoenzim Saka Kalpataru	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	DLH
26	Program Kampung Iklim (Proklam) kategori Utama untuk Desa Rempoah Kec. Baturraden Desa Pandak Kec. Baturraden Desa Pasir Wetan Kec. Karanglewas Desa Pageralang Kec. Kemranjen	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DLH
27	Program Kampung Iklim (Proklam) kategori Madya untuk Desa Danaraja Kec. Banyumas Desa Adisana Kec. Kebasen Desa Karangjati Kec. Kemranjen Kelurahan Karanglesem Kec. Purwokerto Selatan Kel. Bobosan Kec. Purwokerto Barat Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Desa Karangpetir Kec. Tambak	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DLH
28	Program Kampung Iklim (Proklam) kategori Pratama untuk Desa Purbadana Kec. Kembaran Desa Limpakuwus Kec. Sumbang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DLH
29	Satria Brand Award Kepala Daerah Inovatif tahun 2022	Suara Merdeka	Pemkab Banyumas
30	Juara Poster Edukasi Kesehatan Peringkat 3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	RSUD Banyumas
31	Akreditasi kategori Paripurna	Lembaga Akreditasi Rumah Sakit-Damar Husada Paripurna (LARS-DHP)	RSUD Banyumas
32	Akreditasi kategori Paripurna	Kementrian Kesehatan	RSUD Ajibarang

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) Misi, 9 (sembilan) Tujuan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai **342,92%** atau kategori **"Sangat Baik"**. Ada 7 (tujuh) indikator yang tidak tercapai dikarenakan adanya *force majeure pandemic Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* yang merupakan bencana nasional sehingga memaksa Kabupaten Banyumas untuk beradaptasi dengan situasi pasca pandemik. Dari 7 (tujuh) indikator yang tidak tercapai terdapat 3 (indikator) yang nilainya belum *publish*, sehingga belum diketahui terkait ketercapaian kinerjanya. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
<b>TUJUAN 1</b>						
<b>Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>						
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73	71,12*	97,42	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 2</b>						
<b>Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat</b>						
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,38	73,17	101,09	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 3</b>						
<b>Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan</b>						
3.	Persentase penduduk miskin	%	11,76	12,84	91	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 4</b>						
<b>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian</b>						
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,5	4*	88,89	Tinggi



5.	PDRB per Kapita	Juta rupiah	33,725	31,81*	94,32	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 5</b>						
<b>Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis</b>						
6.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,03	79,02	106,74	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 6</b>						
<b>Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja</b>						
7.	Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah	%	2	60,32	3.016	Sangat Tinggi
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,00	6,05	79	Tinggi
9.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	64,06	63,81	99,61	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 7</b>						
<b>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat</b>						
10.	Persentase Kinerja Infrastruktur	%	69,33	64,33	92,79	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 8</b>						
<b>Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif</b>						
11.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	5	6,38	127,6	Sangat Tinggi
<b>TUJUAN 9</b>						
<b>Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat</b>						
12.	Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,586	1,26	120,55	Sangat Tinggi
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>342,92</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Catatan : Data yang bertanda \* adalah data tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebesar 342,92% dengan predikat Sangat Tinggi.
2. 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (83,33%) tercapai dengan dikategorikan "Sangat Tinggi".
3. 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (16,67%) tercapai dengan kategori "Tinggi".

Terkait dengan indikator kinerja yang belum mencapai target terdapat beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan ditahun-tahun berikutnya, agar pada tahun berikutnya target dapat tercapai. Upaya perbaikan tersebut berupa :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



3. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
4. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
5. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
6. Mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi.
7. Mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
9. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.
10. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

## **B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS**

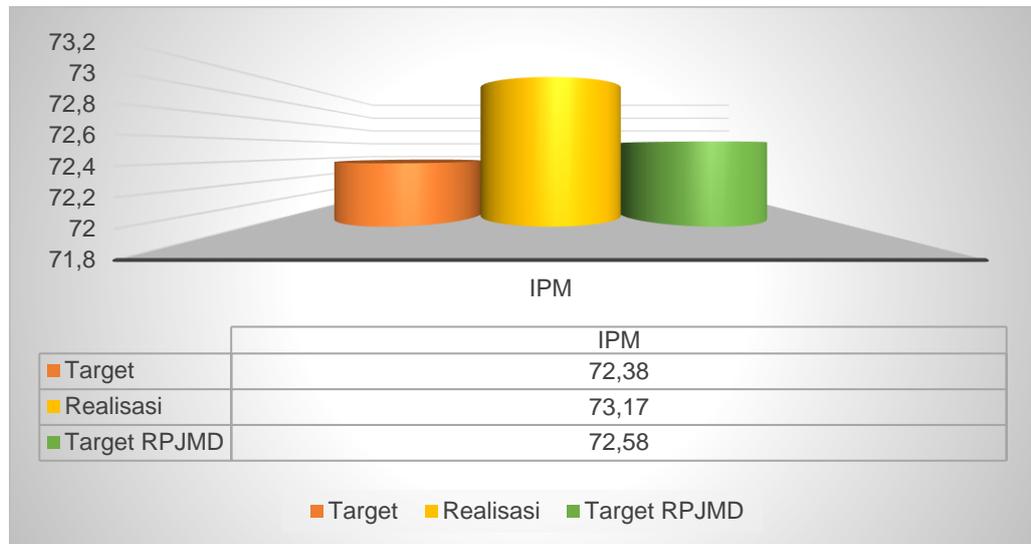
### **1. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Permasalahan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-2 : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, dengan 2 tujuan yaitu :

- a) Tujuan ke-2, Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia dengan target 72,38 dan terealisasi 73,17 sedangkan target akhir RPJMD adalah 72,58; dan
- b) Tujuan ke-3, Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penduduk Miskin dengan target 11,76% dan terealisasi 12,83% dan target akhir RPJMD 11%.

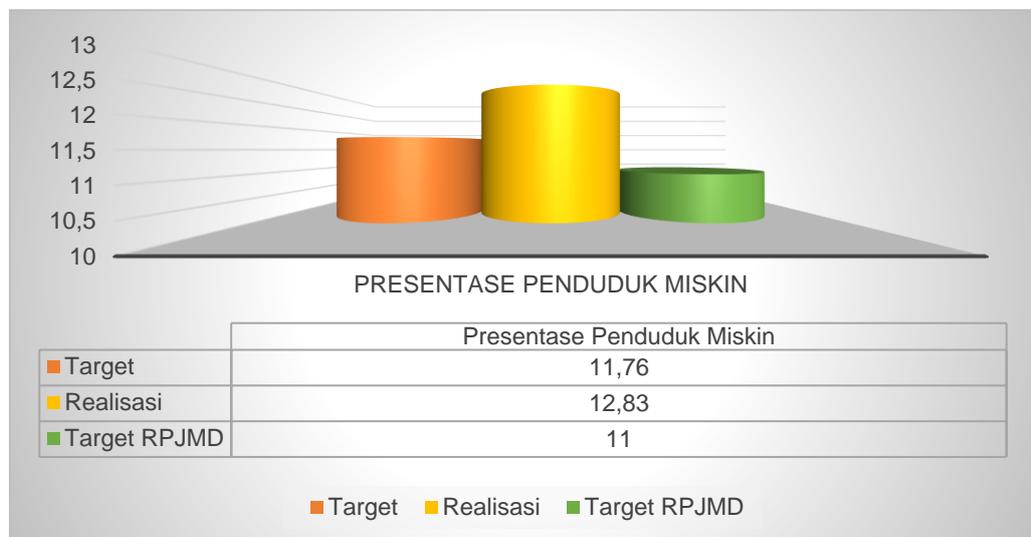
Grafik 4.1.

Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan ke-2



Grafik 4.2.

Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan ke-3



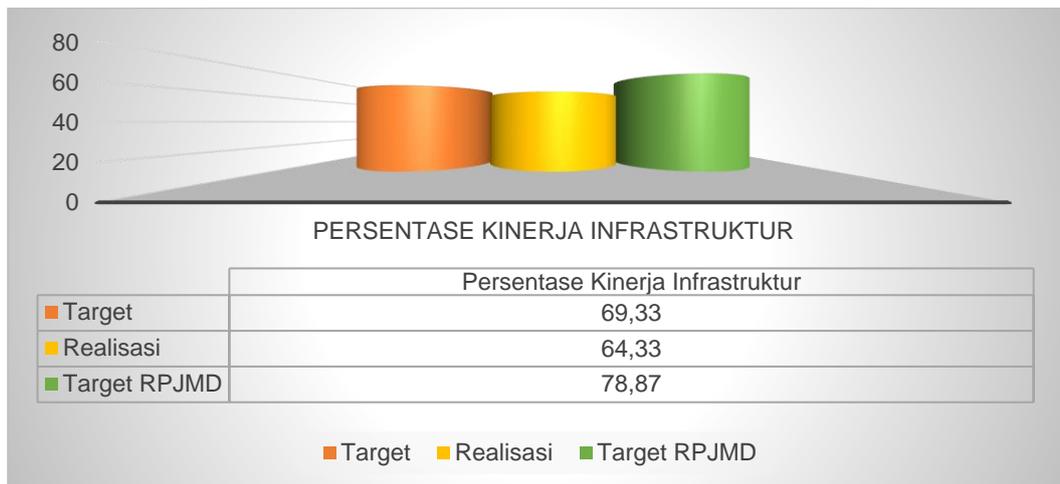
## 2. Ketersediaan Infrastruktur

Permasalahan ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan, dengan tujuan ke-7 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan

didukung oleh Indikator Kinerja Utama Persentase Kinerja Infrastruktur dengan target 69,33% dan terealisasi 64,33% dan target akhir RPJMD 78,87%. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.3.

#### Persentase Kinerja Infrastruktur

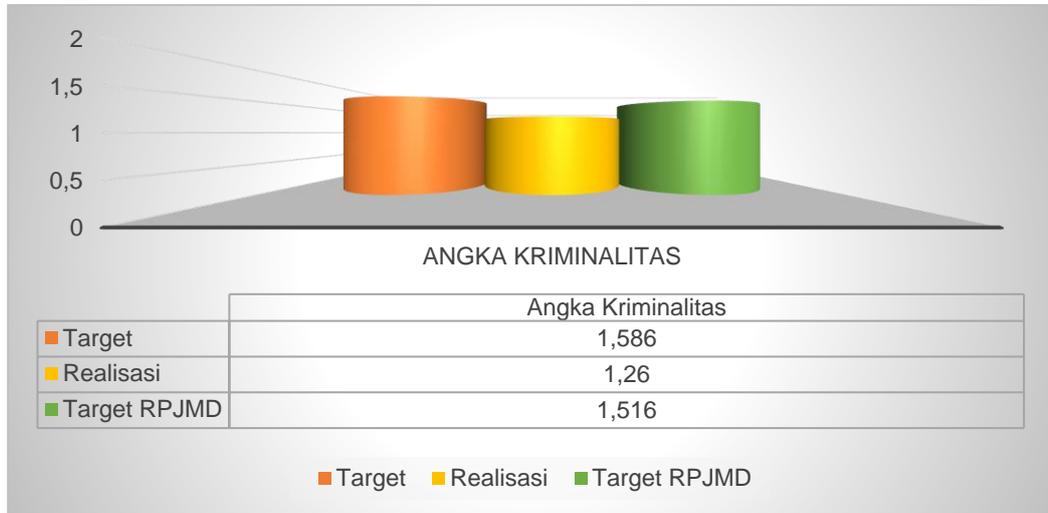


### 3. Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Permasalahan pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan pendapat masyarakat di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-8 : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius, dengan tujuan ke-9: Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu Angka kriminalitas dengan target 1,586 per 10.000 dan terealisasi 1,26 per 10.000 penduduk dengan target akhir RPJMD 1,516 per 10.000 penduduk. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.4.

Pengembangan Potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat

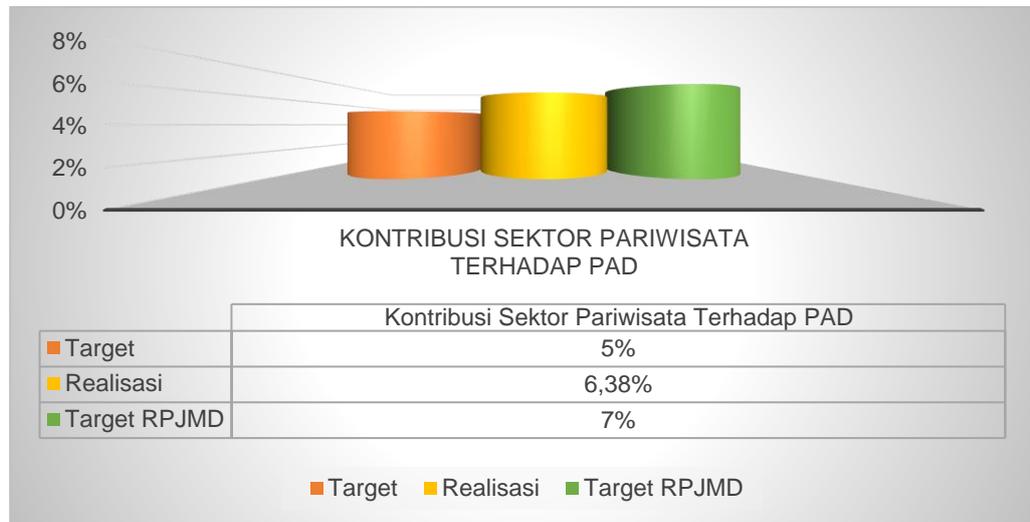


#### 4. Kemiskinan dan Pengangguran

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal, dengan tujuan ke-8 yaitu : Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif dengan Indikator Kinerja Utama sebanyak 1 (satu) IKU, yaitu Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD dengan target 5% dan terealisasi 6,38% dan target akhir RPJMD 7%. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.5.

## Kemiskinan dan Pengangguran

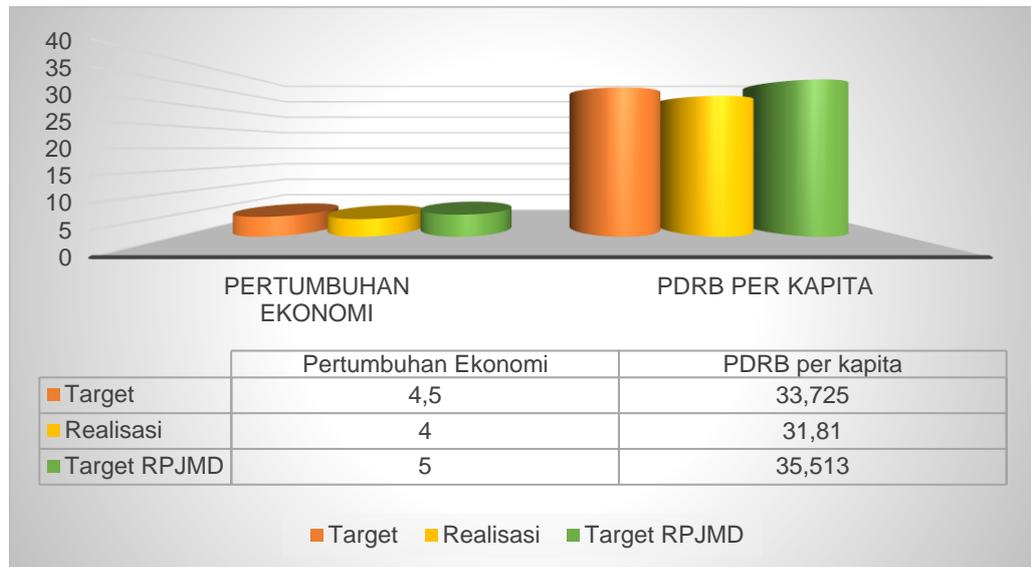


## 5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

Permasalahan pertanian mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan 2 misi, yaitu Misi ke-3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan dengan tujuan ke 4 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Pertumbuhan EKonomi dengan target 4,5% dan pada tahun 2021 terealisasi 4% dengan target akhir RPJMD 5%, untuk data tahun 2022 belum tersedia dari BPS. Sedangkan indikator lainnya yaitu PDRD per kapita dengan target Rp. 33,725 juta dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 31,81 juta target akhir RPJMD Rp. 35,513 juta, untuk data tahun 2022 belum tersedia dari BPS. Misi yang lainnya yaitu misi ke-4: Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan dengan tujuan Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Ketahanan Pangan dengan target 74,03 realisasi 79,02 dengan target akhir RPJMD 74,04. Di bawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.6.

## Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

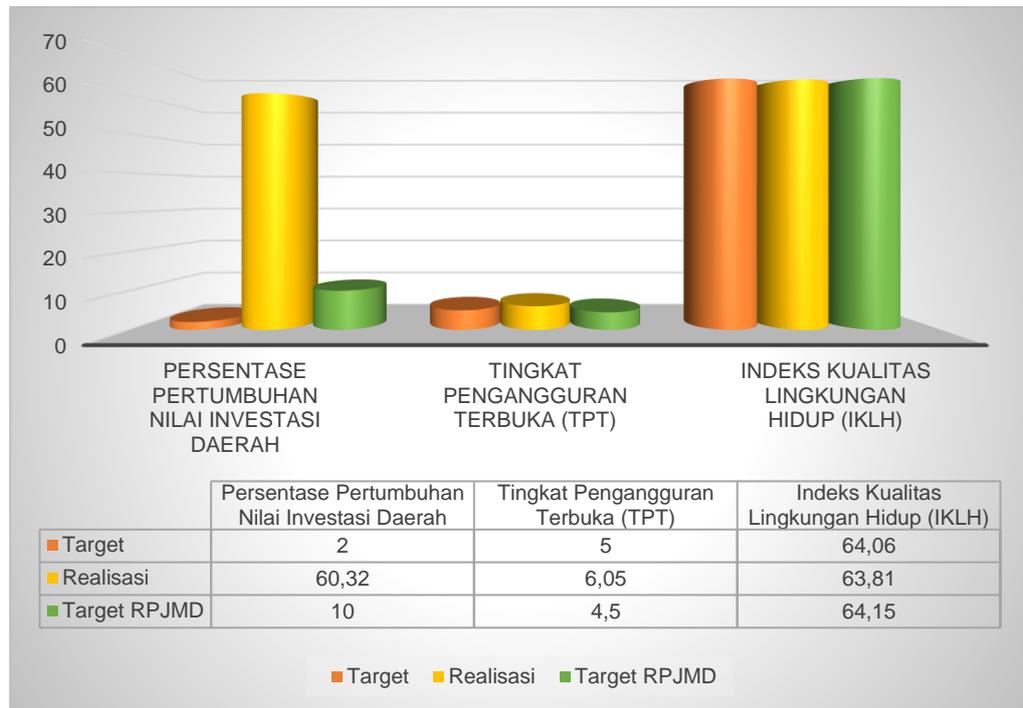


## 6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-5 : Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan, dengan tujuan ke 6 : Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah dengan target 2% dan terealisasi 60,32%, target akhir RPJMD 10%, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target 5% dan terealisasi 6,05% dengan target akhir RPJMD 4,5%, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 64,06, terealisasi 63,81 dan target akhir RPJMD 64,15. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.7.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup



7. Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-1 : Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan dengan tujuan : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 73, realisasi data belum tersedia karena belum rilis dari kementerian PAN dan RB, sehingga data yang digunakan adalah data tahun 2021 dengan capaian 71,12 dan target akhir RPJMD 75.

Grafik 4.8.  
Tata Kelola Pemerintahan



Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas meyakini sepenuhnya bahwa segala pencapaian indikator-indikator yang ada tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak yaitu selain kinerja pimpinan dan aparat pemerintah juga peran serta pihak ketiga, seperti swasta dan masyarakat umum dalam program pembangunan. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan berbagai pihak harus terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap, LKjIP ini dapat menjadi pegangan guna melakukan refleksi tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang mesti dilakukan pada masa mendatang, sehingga pembangunan terus berkelanjutan, sesuai dengan arah yang sudah ditentukan. Untuk itu masukan dan kritik senantiasa menjadi modal penting untuk sebuah perbaikan.